

POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL
(Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Mobilisasi Suara
Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh :
ANICKA MUZAENI
1506016024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah
Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Anicka Muzaeni
NIM : 1506016024
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL
(Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Mobilisasi Suara pada Pilkada 2018 di Kabupaten Tegal)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2019

Pembimbing,

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Bidang substansi Materi

Dr. Misbah Zulfah Elizabeth, M.Hum.

Tanggal: 19 Desember 2019

Muhammad Mahsun, M.A.

Tanggal: 19 Desember 2019

SKRIPSI

POLITIK PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL

**(Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Mobilisasi Suara Pada
Pilkada 2018 di Kabupaten Tegal)**

Disusun Oleh:

Anicka Muzaeni

1506016024

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Desember
2019 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. H. Moh. Parmudi, M.Si
NIP.196904252000031001

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP.19680505 199503 1 002



Penguji II

Solkhak Mufrikah, M.Si

Pembimbing I

Dr. Hj. Misbah Zulfa Eizabeth, M.Hum
NIP. 196201719993 2 001

Pembimbing II

Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2019




Anicka Muzaeni

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan, alhamdulillah telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Politik Perempuan di Tingkat Lokal (Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Memobilisasi Suara Pada Pilkada Tegal 2018)“. Shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Patut disadari dalam penulisan Skripsi ini banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan bagi peneliti.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. H. Adib, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.

5. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Doen Pembimbing 1 peneliti, yang telah memberikan saran, dukungan motivasi dan kekuatan untuk peneliti.
6. Muhammad Mahsun, M.A., selaku Dosen Pembimbing 2 peneliti, yang telah memberikan banyak masukan, do'a, dukungan, dan motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan peneliti tentang berbagai ilmu dan pengetahuan baru sehingga peneliti dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
8. Seluruh Staf Tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
9. Kader Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Tegal yang telah bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian guna pemenuhan tugas akhir, sehingga peneliti mendapatkan berbagai data-data yang mendukung penelitian ini.
10. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi serta doa yang diberikan untuk peneliti.
11. Teman-teman Fantastic4 yang selalu memberikan semangat dan nasihat sederhana dalam proses pembuatan skripsi ini.

12. Teman-teman perjuangan, Hepy Luberisasi, Afidatunnisak, Liya Rizqianah, Uswatun Khasanah, Sifa Fauzia, Malihatn yang telah memberikan semangat serta membantu dalam ujian.
13. Temen temen seperjuangan Ilmu politik 2015 yang menemani belajar di dalam kelas selama 4 Tahun.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti khususnya maupun semua pihak. Kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat menjadi karya yang lebih baik lagi sangat diharapkan. Peneliti juga sadar sebagai manusia biasa tentu sering berbuat khilaf dan kekurangan, semoga karya ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Desember 2019

Anicka Muzaeni

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Wasnah
Siti Kholipah-Mughofar
Keluarga Besar Wasnah
Almamater Tercinta
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS Al-Insyiroh : 6)**

Anicka Muzaeni
1506016024

Women's Politics at the Local Level (Study of the Role of Muslimat and Fatayat NU in Votes Mobilization in 2018 Tegal Election)

ABSTRACT

Women's political progress has become an interesting conversation. Women have shown their existence as an important part of society that has an important role in contributing to building the nation and state. Likewise, what was shown by Fatayat and Muslimat NU in the 2018 Tegal regional election. The members of Fatayat and Muslimat NU in Tegal Regency reaches 73 thousand members, this is a large number and can be an important political machine to support a candidate's victory, either as a success team or as a political broker. In this case, it is important to examine how the role of Fatayat and Muslimat NU in the 2018 Tegal Regional Election. How Elite Fatayat and Muslimat NU view constituents and organizations dan what will Muslimat and Fatayat NU do to mobilize in the 2018 Tegal elections. It seems that the research question will be answered in this thesis.

Furthermore, this study uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that Elite Fatayat and Muslimat NU viewed the consumers as them part. This means that the majority of the people of Tegal Regency are Nahdliyin residents. This gave an understanding to Fatayat and Muslimat NU that as Nahdliyin residents should have supported the Umi-Ardie victory which was supported by 9 NU ulemas. In its contribution in the political world, Fatayat and Muslimat NU made various efforts in mobilizing votes by conducting socialization and consolidation from the branch level to the level of the *majelis taklim* without using the slightest money politics.

Keywords: Role, Fatayat, Muslimat, Election.

أنیکا موزيني
1506016024

سياسة المرأة على المستوى المحلي (دراسة دور مسلمات وفتاير الجامعة الوطنية في تعبئة الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 2018)

الملخص

أصبح التقدم السياسي للمرأة محادثة مثيرة للاهتمام. أظهرت النساء وجودهن كجزء مهم من المجتمع له دور مهم في المساهمة في بناء الأمة والدولة. وبالمثل ، فإن ما تم عرضه من قبل فتيات ومسلمات نو في الانتخابات الإقليمية عام 2018. يصل عدد أعضاء فتيات و "مسلمات من" تيغال ريجنسي" إلى 73 ألف عضو ، وهذا عدد كبير ويمكن أن يكون آلة سياسية مهمة لدعم فوز المرشح ، إما كفريق نجاح أو كوسيط سياسي. في هذه الحالة ، من المهم أن ندرس كيف يمكن لدور الفطاطات والمسلمات في الانتخابات الإقليمية لعام 2018. كيف تنظر نخبة الفساتين ومسلمات إلى الهيئات والمؤسسات. ما هي الخطوات التي اتخذتها فتيات ومسلمات في توي دور فريق النجاح في انتخابات 2018 وكيف أثر إيجابي فتيات ومسلم بعد دعم Umi-Ardie. يبدو أنه سيتم الرد على سؤال البحث في هذه الرسالة.

علاوة على ذلك ، تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج دراسة الحالة. أظهرت نتائج الدراسة أن فتيات ومسلمات ينظران للمستهلكين على أنه. هذا يعني أن غالبية سكان تيغال ريجنسي هم من سكان النهضيين. أعطى هذا تفاهماً للفطاطات والمسلمات ، حيث كان من المفترض أن يدعم سكان النهضيين فوز أومي-أردي الذي كان مدعومًا بـ 9. من خلال إسهامها في العالم السياسي ، بذلت كل من فتيات ومسلمات جهودًا مختلفة في حشد الأصوات من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية والتوحيد من مستوى الفرع إلى مستوى المجالس دون استخدام أدنى سياسة نقدية. أخيرًا ، يكون لاختيار Umi-Ardie تأثير إيجابي على شبكات النساء ، واحدة منها في شكل مساعدة اجتماعية.

كلمات مفتاحية: دور ، فتيات ، مسلمات ، بلكادا.

Anicka Muzaeni

1506016024

Politik Perempuan di Tingkat Lokal (Studi Peran Muslimat dan Fatayat NU dalam Mobilisasi Suara Pada Pilkada Tegal 2018)

ABSTRAK

Kiprah politik perempuan dewasa ini telah menjadi perbincangan yang menarik. Perempuan telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam berkontribusi membangun bangsa dan negara. Begitu juga yang diperlihatkan oleh Fatayat dan Muslimat NU pada Pilkada Tegal 2018. Bahwa kemenangan Umi-Ardie pada Pilkada Tegal 2018 disinyalir kuat mendapat dukungan dari kekuatan jaringan perempuan NU. Jumlah anggota Fatayat dan Muslimat NU Kabupaten Tegal mencapai 73 ribu anggota, ini adalah jumlah yang besar dan dapat menjadi mesin politik penting untuk mendukung kemenangan seorang kandidat, baik sebagai tim sukses atau sebagai broker politik. Dalam hal ini, penting untuk diteliti bagaimana peran Fatayat dan Muslimat NU pada Pilkada Tegal 2018. Bagaimana Elite Fatayat dan Muslimat NU memandang konstituen dan organisasi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Fatayat dan Muslimat NU dalam mengambil peran sebagai tim sukses pada Pilkada Tegal 2018. Kiranya pertanyaan penelitian itu yang akan dijawab pada skripsi ini.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Elite Fatayat dan Muslimat NU dalam memandang konstituen sebagai *Wongedewek*. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Tegal adalah warga Nahdliyin. Ini memberikan pemahaman kepada Fatayat dan Muslimat NU bahwa sebagai warga Nahdliyin sudah seharusnya mendukung kemenangan Umi-Ardie yang didukung oleh 9 ulama besar NU. Dalam kontribusinya di dunia politik, Fatayat dan Muslimat NU melakukan berbagai upaya dalam memobilisasi suara diantara dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi dari tingkat cabang sampai dengan tingkat majelis taklim tanpa menggunakan politik uang sedikitpun.

Kata kunci: Peran, Fatayat, Muslimat, Pilkada.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing.....	ii
Pengesahan	iii
Perernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Persembahan.....	viii
Motto	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
المخلص	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
2. Definisi Operasional.....	24
3. Sumber dan Jenis Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II	Mesin Politik dan Kesetaraan Gender	33
	A. Jaringan Perantara	33
	B. Kesetaraan Gender	43
BAB III	Seting Sosial Politik Kabupaten Tegal	51
	A. Kondisi Geografis	51
	B. Dinamika Politik Pilkada Kabupaten Tegal 2018	58
	1. Profil Kandidat	58
	2. Koalisi Besar Partai Politik	63
	a. Napak Tilas Dua Partai Besar	63
	b. Gambaran Partai Pendukung `	66
	3. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal	70
	C. Profil Fatayat dan Muslimat Kabupaten Tegal	74
	1. Sejarah Muslimat NU	74
	2. Fatayat NU Kabupaten Tegal	80
BAB IV	Peran Jaringan Perempuan NU Pada Pilkada Tegal 2018	91
	A. Pandangan Fatayat dan Muslimat Tentang Politik ...	91
	B. Pandangan Fatayat dan Muslimat Tentang Organisasi	93
	C. Pandangan Fatayat dan Muslimat Terhadap Kandidat Perempuan.....	99
	1. Profil Kandidat Perempuan	99
	2. Pandangan Fatayat dan Muslimat Terhadap Kandidat Perempuan	103
	a. Figur Aktivistis.....	103
	b. Figur Petahana	105
	c. Figur Populis.....	107
	D. Relawan Perempuan NU.....	110

BAB V	Mobilisasi Jaringan Perempuan NU Pada Pilkada Tegal 2018	117
	A. Mobilisasi Suara	117
	1. Konsolidasi dan Sosialisasi	121
	2. Gerakan Tanpa Politik Uang	124
	3. Silaturahmi	129
	4. Mobilisasi melalui <i>Majelis Taklim</i>	133
	5. Mobilisasi <i>Door to Door</i>	138
	6. Mobilisasi <i>by name</i>	139
	7. Pendampingan E-KTP.....	141
	B. Implikasi Teori.....	143
BAB VI	Penutup	147
	A. Kesimpulan.....	147
	B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	53
Tabel 2	Presentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tegal.....	56
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kabupaten Tegal	57
Tabel 4	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tegal Periode 2004-2009	64
Tabel 5	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tegal Periode 2014-2019.....	65
Tabel 6	Sebaran Pemilih Pilkada Tegal 2018 Kabupaten Tegal ..	71
Tabel 7	Perolehan Suara Pada Pilkada Tegal 2018	74
Tabel 8	Aset Muslimat NU Kabupaten Tegal	79
Tabel 9	Wilayah Kerja Fatayat NU Kabupaten Tegal	89
Tabel 10	Rekapitulasi Pendukung Umi-Ardie Per Kecamatan	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masa reformasi merupakan gerbang pembuka bagi terakomodasinya partisipasi perempuan di ranah politik lokal dan nasional. Sebagai pembuka, penyelenggaraan demokrasi langsung dalam suksesi kepemimpinan nasional mendorong ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pertama yang Dipilih Langsung oleh Rakyat (Handoko, 2009: 213). Melalui pemilihan umum diharapkan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik semakin banyak. Pemilihan umum merupakan ajang kompetisi untuk menduduki jabatan-jabatan publik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2009: 3). Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil merupakan salah satu indikator berjalannya sistem demokrasi pada suatu negara. Hadirnya demokrasi menuntut adanya keseimbangan individu dalam politik. Menurut Phillips seperti yang dikutip Marwah (2016: 265), perempuan perlu hadir dalam politik merujuk pada konsep *politics of presence*. Menurutya kehadiran perempuan dalam politik didasari oleh prinsip kesetaraan politik yang mengasumsikan setiap orang seharusnya

menghitung satu dan tidak satupun boleh melebihi yang lain. Namun, realitasnya keterlibatan perempuan dalam politik masih relatif minim.

Zahra Rahnavard (dalam Fatmariza, 2005: 49) mengungkapkan bahwa “*women have been in active and present, at time in large numbers then men, in our public demonstrations. But when it comes to political appointments, they are pushed aside.*” (Dalam demonstrasi umum perempuan telah aktif dan hadir pada suatu waktu dengan jumlah besar dari pada laki-laki, tetapi ketika sampai ke perjanjian politik mereka kembali terpinggirkan). Maksudnya adalah bahwa perempuan sebagai kelompok yang kuantitasnya relatif cukup besar dibandingkan laki-laki senantiasa terlibat dalam upaya-upaya politik seperti “merebut kemerdekaan”, dan demonstrasi berskala besar yang berupaya menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Namun demikian seringkali perempuan kembali termarginalkan apabila agenda politik tersebut telah selesai. Akses perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan juga belum terasa secara signifikan. Bahkan kehadiran dan eksistensi perempuan dianggap sebelah mata (Saputra, 2011: 19). Problematika di atas nampaknya menjadikan minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia selama ini.

Pilkada langsung merupakan konsekuensi politik dari disepakatinya UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden

dan wakil Presiden yang mengatur sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagai revisi UU No 22 Tahun 1999 yaitu UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan model pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hadirnya undang-undang tersebut berimbas pada diselenggarakannya pilkada langsung di sebagian wilayah Indonesia di tahun 2005 dan 2006. Dalam konteks pilkada langsung yang dihelat pada bulan Juni 2005 diikuti oleh 226 wilayah yang meliputi pemilihan gubernur di 11 provinsi, pemilihan bupati di 179 kabupaten, dan pemilihan walikota di 36 kota. Hingga Desember 2006 pilkada langsung telah diselenggarakan di 296 wilayah di seluruh Indonesia. Dari 296 wilayah hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti kandidat perempuan, selebihnya (79,4 persen) diikuti oleh laki-laki. Terdapat 69 orang perempuan yang ikut berpartisipasi sebagai kandidat. Perinciannya 19 orang (27,5 persen) maju sebagai kepala daerah dan 50 orang (72,5) maju sebagai wakil kepala daerah (Marwah dan Handoko, 2008: 70). Data tersebut memperlihatkan bagaimana minimnya keterlibatan perempuan dalam konteks pilkada langsung pada tahun 2005 dan 2006.

Begitu juga di pilkada serentak yang dihelat pada 9 Desember 2015 menjadi contoh bagaimana minimnya keterlibatan kaum perempuan dan juga rendahnya opini yang mengemuka tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pilkada untuk

memperoleh kursi eksekutif di daerah-daerah. Perhitungan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari 1.584 peserta yang memenuhi syarat, hanya 116 atau 7,32 persen yang berjenis kelamin perempuan (Marlina, 2015: 17). Marlina mengungkapkan bahwa minimnya keterlibatan perempuan dalam politik didasarkan bukan hanya pada pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya ikhlas memberikan kesempatan untuk perempuan berpolitik namun, faktor lain juga hadir dalam diri individu perempuan itu sendiri yang masih memiliki semangat yang rendah dalam urusan politik sehingga mereka cenderung untuk tidak ikut terlibat dalam dunia politik.

Shvedova (dalam Rahmatunnisa, 2016: 94) mengungkapkan ada tiga jenis hambatan bagi perempuan yang terlibat dalam dunia politik yaitu hambatan politik, sosial ekonomi dan sosio-kultural. Yang dimaksud dengan hambatan politik adalah adanya “*masculine model*” baik di institusi politik maupun birokrasi yang sangat kuat, kurangnya dukungan partai politik dan lembaga-lembaga formal negara, kurangnya akses pendidikan, pelatihan dan karakter dari sistem pemilu yang tidak memihak pada penguatan keterwakilan perempuan. Sementara hambatan sosial ekonomi adalah minimnya sumberdaya finansial, akses pendidikan dan profesi yang terbatas, serta “*dual burden*” tugas rumah tangga dan profesi. Sedangkan yang ketiga adalah hambatan sosio-kultural dimaksudkan bahwa hambatan ini ada

dalam bentuk ideologi gender yang dianut, pola-pola budaya, peran dan tugas sosial antara perempuan dan laki-laki, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk ikut serta dalam pemilu, dan persepsi perempuan yang memandang politik sebagai permainan yang kotor (*dirty games*).

Hambatan-hambatan tersebut tidak begitu berarti bagi organisasi Muslimat dan Fatayat NU. Organisasi Muslimat dan Fatayat NU memiliki tekad untuk berkontribusi dalam tatanan sosial politik. Hal ini tergambar jelas pada arah perjuangan Organisasi Perempuan NU, sebagaimana disebutkan dalam Kongres Muslimat dan Fatayat NU ke 13 di Kaliurang Yogyakarta tanggal 13 Juli – 4 Agustus 1995 yang menyatakan bahwa Landasan Perjuangan Kader Perempuan NU adalah salah satunya memberikan hak yang sama kepada kaum perempuan (Farih, 2009: 96). Pendapat senada juga disampaikan oleh Nahdlatul Ulama bahwa keinginan kaum perempuan untuk terlibat dalam politik sebenarnya telah dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 17-21 November 1997, dimana ditetapkan Keputusan Nomor 004/Munas/11/1997 mengenai Kedudukan Perempuan dalam Islam. Keputusan tersebut mengakui bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada setiap perempuan dan laki-laki untuk ikut berperan dalam tatanan sosial politik dengan syarat mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menduduki peranan

sosial dan politik (Fadli, 2017: 55). Peneliti berpendapat bahwa landasan formal tersebut mampu memberikan angin segar sekaligus dijadikan fondasi dasar bagi organisasi Muslimat dan Fatayat NU untuk ikut berkontribusi dalam tatanan sosial politik.

Kontestasi pilkada serentak yang diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia Tahun 2018, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur memberikan bukti bahwa Muslimat dan Fatayat NU mampu berkontribusi dalam tatanan sosial politik. Organisasi Perempuan NU ini menempatkan beberapa kader terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, di Jawa Tengah ada dua kader NU di Kabupaten Tegal yakni Hj Umi Azizah dan Sabilillah Ardie (selanjutnya disingkat Umi-Ardie) resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal (Gumilang, 2019). Sedangkan di Jawa Timur ada beberapa kader terpilih diantaranya adalah Munjidah Wahab Ketua PC Muslimat NU Jombang terpilih sebagai Bupati Jombang, Ita Puspita Sari yang menjabat sebagai Bendahara PC Muslimat NU Kota Mojokerto terpilih menjadi Wali Kota Mojokerto, Lilik Muhibah Ketua PC Muslimat NU Kediri terpilih kembali menjadi Wakil Wali Kota Kediri, Anna Muawanah yang menjabat sebagai Sekertaris IV PP Muslimat NU terpilih sebagai Bupati Bojonegoro dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur (Torik, 2018).

Kemenangan Khofifah Indar Parawansa menjadi Gubernur Jawa Timur yang memiliki latar belakang sebagai aktivis Muslimat dan Fatayat NU dalam pemilihan lokal di provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari peran penting dua organisasi perempuan NU yaitu Muslimat dan Fatayat yang memiliki jumlah pengikut cukup besar dan loyalitas yang signifikan di Provinsi Jawa Timur (Irawanto, 2018: 5). Dalam hal ini, peneliti melihat adanya konteks dinamika politik yang sama seperti yang terjadi di Jawa Tengah khususnya pada Pilkada Tegal. Muslimat dan Fatayat NU dalam konteks di Jawa Tengah merupakan organisasi perempuan NU yang memiliki basis massa yang cukup besar. Menurut Sekjen Fatayat NU Jawa Tengah, anggota Muslimat dan Fatayat NU di Provinsi Jawa Tengah berjumlah sekitar 8 sampai 9 juta anggota (Wawancara, Sekjen Fatayat NU Jateng, 09 Agustus 2019). Sedangkan dalam konteks Kabupaten Tegal menurut salah satu anggota Muslimat dan Fatayat NU bahwa jumlah anggota Muslimat dan Fatayat NU berkisar kurang lebih 73 ribu anggota dengan rincian Fatayat NU memiliki 36 ribu anggota, sedangkan Muslimat NU memiliki 37 ribu anggota (Wawancara, Anggota Fatayat NU Kabupaten Tegal, 30 Juli 2019). Ini adalah jumlah yang besar dan dapat menjadi mesin politik penting untuk mendukung kemenangan seorang kandidat, baik sebagai tim sukses atau sebagai broker politik. Yang dimaksud broker politik adalah pekerja kampanye yang

termotivasi oleh imbalan materi. Selain itu, *broker* bekerja untuk mendistribusikan material dari kandidat kepada pemilih (Darwin, 2017: 533).

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa kemenangan pasangan Umi-Ardie di Pilkada Tegal 2018 salah satunya kuat disinyalir mendapat dukungan dari jaringan Muslimat dan Fatayat NU Tegal. Figure Umi Azizah sebagai personal yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tegal, tidak hanya mengacu pada posisinya sebagai *incumbent* yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 menggantikan Ki Enthus Susmono, tetapi kepada kiprahnya di masyarakat. Sebelum berkecimpung di ranah politik, Umi lebih dulu mengawali kiprahnya dengan mendedikasikan diri aktif di organisasi kemasyarakatan perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) kabupaten Tegal. Tercatat selama dua periode, Umi Azizah terpilih menjadi ketua PC Fatayat NU, yaitu tahun 1987-1992 dan 1992-1997. Kepiawannya memimpin organisasi ini juga terbukti dengan terpilihnya kembali Umi sebagai ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal dari tahun 2005 hingga sekarang (Gumilang, 2019).

Keterpilihan sejumlah perempuan NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Umi di Tegal pada Pilkada serentak Tahun 2018 tersebut menjadi momentum bersejarah bagi organisasi perempuan NU. Keterpilihan Umi sebagai Bupati Tegal

menunjukkan bahwa adanya keseriusan kinerja organisasi perempuan NU dalam menempatkan kadernya untuk ikut andil dalam sistem perpolitikan negara walaupun masih dalam lingkup daerah. Ini senada dengan transformasi politik global menjelang abad ke-21, salah satu cirinya ditandai dengan runtuhnya tatanan budaya patriarki (*the end of patriarchy*) diberbagai belahan dunia (Azizah, 2014: 154). Keruntuhan patriarki yang dimaksud bukanlah situasi dimana hadirnya perempuan di ranah publik menyamakan dominasi laki-laki baik secara kapasitas maupun jumlah, melainkan lebih kepada memperbaiki formasi pada tatanan sosial politik dan budaya terhadap peran dan pembagian ruang kerja di ranah publik maupun privat bagi laki-laki.

Memperhatikan dinamika politik NU di atas, maka kajian yang menempatkan organisasi perempuan NU sebagai bagian dari dinamika politik NU di Indonesia perlu mendapat perhatian dalam studi politik. Kajian ini penting dilakukan mengingat studi politik NU lebih banyak didominasi oleh kajian yang menempatkan NU sebagai laki-laki. Dengan kata lain, dominasi perspektif maskulin kuat dalam melihat politik NU, dan mengabaikan peran serta politik perempuan di dalamnya. Oleh karena itu, studi ini hendak mengkaji politik perempuan NU yang fokus pada bagaimana peran Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan pasangan Umi-Ardie di Pilkada Tegal 2018.

B. Rumusan Masalah

Hadirnya organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat NU dalam lingkup pemilihan kepala daerah di Indonesia tentunya memiliki pengaruh dalam proses perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Ini tentu sedikit banyak akan berpengaruh pada dinamika politik di dalam tubuh organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat NU itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang Politik Perempuan di Tingkat Lokal yang mengambil studi peran Muslimat dan Fatayat NU dalam mobilisasi pada Pilkada 2018 ini akan dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana pandangan elit Muslimat dan Fatayat NU tentang politik, organisasi dan kandidat perempuan pada Pilkada Tegal Tahun 2018?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan pasangan Umi-Ardie Pada Pilkada Tegal Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang peran Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan pasangan Umi-Ardie pada Pilkada Tegal Tahun 2018 ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran politik organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat NU dalam mendukung pemenangan Umi-Ardie di Pilkada Tegal 2018.
2. Untuk mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat NU dalam mobilisasi dukungan pemilih dalam mendukung pemenangan Umi-Ardie di Pilkada Tegal 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritik:
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan khasanah keilmuan dan mengembangkan wacana perdebatan terkait dengan isu-isu perempuan dalam dunia politik di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran terkait keterlibatan organisasi perempuan NU dalam melibatkan diri pada proses pemilihan kepemimpinan di tingkat eksekutif lokal.
2. Secara Praktis:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penelitian keterlibatan organisasi perempuan Muslimat dan Fatayat NU pada pilkada di Tegal.

- b. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut mengenai broker politik perempuan pada pemilihan kepala daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang politik perempuan NU bukan merupakan studi yang baru karena telah banyak ahli yang mengkaji tentang politik perempuan NU. Dari beragam studi tersebut, dapat dipetakan pada empat kelompok kajian.

Kelompok pertama membahas terkait bagaimana peran Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial keagamaan. Misalnya, skripsi Dzarotul Qorina, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2016 dengan judul *Peran Muslimat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-2010*. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Muslimat dalam meningkatkan status perempuan yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan di bidang sosial, lingkungan hidup, koperasi, organisasi, budaya, dakwah dan penerangan serta ekonomi. Program-program yang terlaksana yaitu membangun klinik, program KB yang bekerjasama dengan PKK dan BKKBN, mendata majlis ta'lim, mendata khafidhoh, menyelenggarakan hari besar Islam, siraman rohani, lomba-lomba MTQ dan da'wah, membangun panti asuhan PSAA, bakti sosial, dan membangun

klirik Siti Rohmah. Singkatnya Muslimat telah berperan penting di Batang seperti mendirikan panti asuhan, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam hal agama. Muslimat di Batang telah memperhatikan anggotanya yang tercermin melalui gerakan yang dilakukan Muslimat selama ini, dibuktikan dengan adanya klinik di bawah YKM NU dari sinilah nantinya digalakan KB, sosialisasi mengenai kesehatan yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat Batang. Mendirikan panti asuhan yang dilandasi dengan tujuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar.

Skripsi Nur Arofah, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro 2018 dengan judul *Peran Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan (Analisis Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel bertumpu pada anak ranting atau masyarakat sekitar menyebutnya jamiyah atau majelis ta'lim. Kegiatan Muslimat NU Desa Tuwel memang sudah terkenal aktif sedari dulu, melalui kegiatan Pengajian dan serangkaian kegiatan sosial, namun untuk kegiatan non-keagamaan baru mulai dirintis baru 7 tahun belakangan, yaitu dari tahun 2011. Pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel didukung oleh berbagai sumber daya, mulai dari internalisasi nilai agama, kemampuan ekonomi hingga hubungan kerjasama dengan instansi lain yang memang telah berjalan dengan baik. Perihal *sense of agency* yang berhubungan

dengan *power relation* sudah mulai dari beberapa anggota, dari adanya pemberdayaan sebagian besar masih pada tataran pemenuhan kebutuhan praktis gender. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel masih terbatas pada pemberdayaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan praktis gender, namun pemberdayaan ini mulai mengarah pada pemberdayaan strategis, dimana partisipasi perempuan dalam pembangunan mulai dilibatkan, selain itu kesadaran laki-laki dalam upaya gender mainstreaming semakin meningkat.

Artikel yang ditulis oleh Tyas Asih Ismiati (2017) yang berjudul *Peran Muslimat Sebagai Organisasi Wanita Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri: 1950-1999* memberikan hasil bahwa fokus peranan Muslimat di Kabupaten Kediri bergerak dalam bidang agama, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Muslimat ada di Kediri sekitar tahun 1950, Muslimat Kabupaten Kediri merupakan perluasan Muslimat Pimpinan Wilayah Jawa Timur, yang berawal dari komunitas pengajian ibu-ibu kampung keliling dari rumah-rumah, akhirnya dilegalitaskan menjaadi Muslimat Ranting yang sah secara hukum. Pada tahun 1990-an budaya memakai jilbab belum massif di kalangan ibu-ibu. Peran Muslimat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran para ibu untuk berhijab dan menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam. Muslimat NU sangat merespon baik terhadap kebijakan-kebijakan

pemerintah, misalnya pada program Keluarga Berencana, Muslimat turut andil dalam sosialisasi program tersebut dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat guna mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana. Pada tahun 1975 berdiri TK/RA/PAUD yang diprakarsai oleh Bu Hj Andarzuni Ghozali, Pada tahun 1986 Muslimat Kabupaten Kediri mendirikan Yayasan Darul Aitam Muslimat NU Budi Mulia. Yayasan ini dibentuk pada masa Hj Zainuri. Yayasan ini menaungi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti panti asuhan dan pondok pesantren. Peranan Muslimat yang lain adalah mendirikan koperasi An Nisa pada tahun 1980 an serta turut aktif menjadi panitia Muktamar NU 1998 di pondok pesantren Lirboyo.

Artikel lain yang ditulis oleh Erni Isnaeniyah (2017) dengan judul *Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU* mengungkapkan bahwa peran perempuan saat tergabung dalam Organisasi Perempuan Islam Indonesia yang dinamakan Muslimat NU banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan para perempuan di Indonesia khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat secara internal dan juga eksternal. Seperti mengatasi masalah perkawinan di bawah umur adalah masalah nasional yang harus segera dituntaskan. Melalui keikutsertaan pimpinan-pimpinan Muslimat menurut tingkatannya dalam Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Implikasi yang ditunjukkan yaitu

memberi perubahan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Perempuan juga dituntut aktif di lembaga-lembaga pemerintahan seperti ikut merumuskan undang-undang sebagai aspirasi dari suara rakyat (DPR) juga pada saat yang sama organisasi perempuan ini juga mampu membuka kelompok komunis di Indonesia.

Kelompok kedua membahas terkait berbagai macam perspektif yang digunakan untuk melihat bagaimana perempuan NU berpolitik. Misalnya, skripsi oleh Zidna Karimatunisa, Jurusan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015 dengan judul *Perempuan Berpolitik Perspektif Nahdlatul Ulama (Analisi terhadap Keputusan Bahsul Masa'il Tahun 1961, 1997 dan 1999 M)*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *usul fiqh*. Penelitian ini menghasilkan penemuan sebagai berikut: pertama, keputusan Bahsul Masa'il Tahun 1996 yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, yakni menggunakan pemikiran para ulama tradisional yang berpegang teguh pada pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning dan dipahami secara tekstual (dengan metode *istinbat qauli*) tanpa adanya analisis kritis. Kemudian faktor sosial dinamika politik dalam tubuh NU dan kondisi perempuan yang masih di bawah pengaruh kepemimpinan laki-laki pada saat itu. Kedua, munculnya keputusan Bahsul Masa'il yang progresif di

Tahun 1997 dan Tahun 1999 tentang kebolehan perempuan berpolitik yakni dengan menggunakan pemikiran kaum modernis yang dengan paradigma formalistik-tekstualnya telah melakukan revitalisasi fiqh mazhab, yakni tetap menganut pola mazhab dengan melihat perubahan zaman (dengan metode *istinbat manhajy*) selain itu konteks dunia modern yang menuntut elemen seluruh bangsa untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga apabila keputusan Bahsul Masa'il Tahun 1961 tetap diterapkan, tidak relevan untuk jangka panjang seiring dengan perubahan zaman.

Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme : Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream yang dimuat dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik oleh Linda Dwi Eriyanti (2016) menjelaskan bahwa studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif feminis yang sesuai untuk mendeskripsikan pemikiran politik perempuan NU non-mainstream. Penulis menemukan bahwa selama ini ada pemikiran politik perempuan NU yang dikategorikan menjadi pemikiran mainstream dan nonmainstream. Pemikiran mainstream melingkupi banyak isu yang terkait dengan politik formal perempuan, kesetaraan gender, juga seksualitas. Pemikir-pemikir mainstream memberikan preskripsi atas isu-isu tersebut melalui politik formal kenegaraan dan di wilayah publik. Sedangkan pemikiran politik perempuan non-mainstream, meski

mengidentifikasi sumber dan dampak operasi terhadap perempuan sama dengan pemikiran mainstream, mereka memberikan catatan analisis dan pendekatan yang berbeda. Studi ini mencoba mengkerangkai ragam pemikiran politik NU tersebut melalui empat aliran feminis, yakni feminis Liberal, feminis Marxis, feminis Sosialis, dan feminis Radikal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ide-ide di dalam feminis radikal ternyata lebih banyak memberikan ruang dalam menjelaskan fenomena pemikiran-pemikiran politik perempuan NU non-mainstream, di mana mereka cenderung muncul dari kalangan bawah, dan tidak terorganisasi secara formal.

Kelompok ketiga menjelaskan berbagai macam persoalan internal organisasi perempuan NU itu sendiri dalam berpolitik. Misalnya, Yusuf Fadli (2017) menulis tentang *Islam, Perempuan dan Politik : Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi*. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk kajian pustaka dengan kaedah analisis deskriptif. Kajian ini menggunakan teori partisipasi politik dan konsep feminisme. Bahwa keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam. Pasca reformasi, gerakan wanita NU masuk ke dalam wilayah politik untuk memperbaiki kondisi sosial wanita yang telah lama di tepikan. Dengan latar belakang tersebut kajian ini dijalankan dengan fokus utama ialah

gerakan perempuan Nahdlatul Ulama dan keterlibatan perempuan NU dalam politik Indonesia. Dapatan kajian menunjukkan bahwa NU berhasil meningkatkan perwakilan wanita dalam politik, khususnya di DPR RI (parlemen). Namun, keberhasilan perempuan NU tersebut belum dapat memperbaiki kondisi perempuan secara keseluruhan, karena ia merupakan sebuah proses yang memerlukan masa dan kesabaran.

Berbeda dengan Yusuf, Sri Roviana (2014) menulis tentang *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*. Roviana menjelaskan bahwa Gerakan perempuan yang berbasiskan keagamaan seperti Fatayat dan Muslimat sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pelaku perubahan politik. Namun sampai saat ini berdasarkan survei literatur, tampaknya baik Muslimat maupun Fatayat belum mampu berperan maksimal dalam transformasi politik karena berbagai macam persoalan yang membelitnya diantaranya adalah perempuan sendiri yang masih banyak “belum melek politik” dan berbagai persoalan internal organisasi yang membelitnya. Jamaah yang menjadi bagian dari NU tidak memiliki kepekaan politik sebagaimana yang diperankan oleh kyai dan nyai, bahkan ummat (jamaah) seringkali hanya dijadikan komoditas politik pada saat pemilu dan pemilukada. Persoalan lain juga tidak berdayanya perempuan dari Muslimat dan Fatayat memberikan pendidikan politik pada jamaah NU perempuan dan

jamaah NU laki-laki karena sebagian laki-laki NU setengah hati memberikan dukungan politik pada perempuan. Temuan lain juga soal perempuan politisi dan penggerak di NU memiliki keterbatasan peran karena sebagian kyai masih cenderung menggunakan pola pikir dan sikap patriarkhi, dimana kepemimpinan perempuan hanya dapat diterima sebagai wacana, namun sulit diterima dalam politik riil. Pemikiran Khofifah Indar Parawansa, Masruchah, Musdah Mulia, Ermalena, Nursyahbani Katjasungkana, dapat diterima di kalangan aktivis berlatarbelakang NU dan diluar NU, namun justru di kalangan mainstreame NU, khususnya kyai dan nyai tradisional belum sepenuhnya menerima.

Kelompok keempat membahas terkait bekerjanya broker atau organisasi Muslimat dan Fatayat NU dalam mendukung kandidat pada Pileg dan pilkada. Misalnya, penelitian yang berjudul *Blora, Jawa Tengah: Sabet sebagai Penentu Kemenangan* tulisan Zusiana Elly Triantini (2015) menjelaskan bahwa salah satu penentu kemengan kandidat pada Pemilihan Legislatif di Blora Jawa Tengah Tahun 2014 adalah broker atau yang kerap disebut dengan istilah *sabet*, kader, atau tim sukses. Kategori sabet mengalami perkembangan dari kategorisasi penelitian sebelumnya. Pada kategorisasi sebelumnya disebutkan adanya tiga jenis broker, yaitu broker aktivis, broker klientelistik dan broker oprtunis. Di Blora, ditemukan broker oprtunis ekstrem

yang bekerja untuk banyak kandidat caleg bahkan mereka bekerja untuk banyak kandidat, bahkan mereka bekerja untuk caleg pada dapil yang sama tetapi partai berbeda ataupun partai sama demi keuntungan pribadi. Parahnya broker jenis terakhir ini mengakibatkan suara caleg rusak di beberapa tempat karena konstituen pendukung hanya berdasarkan pada satu data untuk banyak kandidat. Broker bekerja dengan menggunakan pola teradministrasi yaitu dengan *by name by address*. Broker mendata konstituen sebagai acuan data sebaran uang kepada pemilih guna mempengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara.

Penelitian lain yang berjudul *Madiun, Jawa Timur: Peran Broker dalam Strategi Teritorial, Jaringan Sosial, dan Pembelian Suara* oleh Ahmad Zainul Hamdi (2015) menjelaskan bahwa hampir semua caleg di Madiun menekankan pentingnya hubungan personalnya dengan pemilih, tetapi pada akhirnya caleg sangat bergantung kepada broker (orang yang berfungsi menghubungkan caleg dengan pemilih dan memastikan barang-barang patronase tersalurkan dengan baik). Broker menjadi penghubung antara ketua organisasi tertentu dengan caleg guna mendapat dukungan dari jaringan sosial tersebut dan pada saat caleg ingin menyebar uang juga membutuhkan broker untuk mendistribusikannya dengan pemilih. Caleg menggunakan jasa broker dalam setiap strategi guna mempengaruhi pilihan pemilih.

Artikel Budi Iswanto (2018) dengan judul *Political Machinery or Women Networks?: The Case of East Java's 2018 Gubernatorial Election* menjelaskan bahwa kemenangan Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur menunjukkan bahwa mesin partai tidak selalu menjadi kendaraan yang efektif untuk mobilisasi pemilih. Faktor lain seperti latar belakang Kandidat (Khofifah) sebagai nahdliyin (anggota NU), garis silsilah keluarga dan kekerabatan politik nampaknya juga tidak begitu berpengaruh pada Pilkada di Jawa Timur Tahun 2018. Alih-alih, jaringan perempuan melalui Muslimat NU tampaknya menjadi faktor yang lebih menentukan dalam memobilisasi dukungan untuk Khofifah. Hasilnya menghilangkan kepercayaan populer bahwa seorang wanita bisa menang hanya jika dia adalah bagian dari dinasti politik atau memiliki hubungan dekat dengan elit politik.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti ingin menguatkan pada kelompok keempat, yaitu tentang peran broker dalam hal ini adalah organisasi Muslimat dan Fatayat NU dalam mempengaruhi pilihan pemilih pada kontestasi Pilkada. Peneliti menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terkait peran dan strategi Muslimat dan fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan pasangan Umi-Ardie pada Pilkada Tegal Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menyajikan pemaparan dan penjelasan yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan obyek (masalah) yang diteliti, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu analisis kesimpulan dari permasalahan yang ada (Sugiyono, 2008: 45). Menurut Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian misalnya sikap, pendapat, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi pendekatan studi kasus untuk membantu dalam memahami dan menafsirkan peran Muslimat dan Fatayat NU dalam mendukung kemenangan Umi-Ardie di Pilkada Tegal Tahun 2018 yang menjadi fokus studi ini. Pendekatan studi kasus didefinisikan sebagai suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman secara mendalam dari individu,

kelompok atau situasi sosial (Emzir, 2012: 20). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang lebih cocok pada pertanyaan *how* atau *why* bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dalam *setting* sosial (Robert, 2006: 1).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan upaya memperjelas ruang lingkup dan untuk menghindari kesalahan persepsian terhadap penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah yang diteliti. Berikut ini adalah istilah perlu peneliti batasi dalam dalam penelitian :

Pertama, Muslimat dan Fatayat NU adalah bagian dari jenis badan otonom NU atau dapat diartikan sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki rentan usia tertentu (Haris, 2015: 300).

Kedua, broker politik adalah didefinisikan sebagai pekerja kampanye yang termotivasi oleh imbalan materi , selain itu broker bekerja untuk mendistribusikan material dari kandidat kepada pemilih (Darwin, 2017:533). Muslimat dan Fatayat NU diasumsikan penulis sebagai broker politik yang mempengaruhi pilihan pemilih pada pilkada Tegal Tahun

2018. Jaringan broker yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tim sukses dan mesin-mesin jaringan sosial.

Ketiga, kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Nugroho, 2011: 29).

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama (data mentah yang harus diolah lagi sehingga menjadi informasi yang mempunyai makna (Kriyantono, 2006: 41-42).

Sumber data yang menjadi subjek penulisan ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung

diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya (Azwar, 2001: 91)

Data sekunder didapatkan dengan cara mengambil dari berbagai sumber artikel, buku-buku, jurnal, sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan objek penulisan yang dapat mendukung penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa metode diantaranya, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti elite Muslimat dan Fatayat NU yang tergabung dalam tim sukses dalam pemilihan bupati di kabupaten Tegal.

Adapun informan dalam wawancara terdiri dari beberapa elemen masyarakat, yaitu: para timsukses atau broker politik, dan masyarakat yang terlibat. Daftar para

informan yang akan peneliti wawancara yaitu: Azimah (PC Muslimat NU Kab.Tegal), Rokhmah (Sekretaris PC Muslimat NU Kab.Tegal), Ida (Ketua PC Fatayat Kab.Tegal), Masrukhah (Sekretaris PC Fatayat NU), Rohimah (Ketua Majelis Ta'lim /Ketua Muslimat AR Ds. Balapulung) Evi (Ketua Fatayat Ranting Ds. Balapulung), Feni (Tim-Sukses/Pengurus Fatayat Anak Cabang Kab.Tegal), Ajeng (Ketua Fatayat Ranting Grobogan), Teti (Kordes Ds. Grobogan/Bendahara Fatayat Ranting Ds. Grobogan), Lati (Ketua Muslimat Ranting Ds. Tembok), A'am (Ketua Fatayat Ranting Tembok), Lanti (Anggota Fatayat dan Kordes Ds. Dukuhringin), Leli (Ketua Fatayat Ranting Yamansari), Barokah (Juru Kampanye/Ketua Muslimat Ranting Ds. Balapulung Kulon), Maryem (masyarakat) Tobi'in (Masyarakat).

Wawancara akan digunakan sebagai bagian dari menelusuri data-data yang berasal dari narasumber-narasumber kunci yang dilakukan secara mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara resmi terstruktur agar keluwesan dan keleluasaan dalam mencari data tetap terjaga.

2. Observasi Terlibat

Observasi Terlibat digunakan untuk secara langsung melihat, mendengar dan merasakan apa yang

dialami subyek penelitian/masyarakat yang diindikasikan sebagai tim sukses pasangan Umi-Ardie agar mendapatkan data yang sedekat mungkin dengan realitas.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Studi Dokumen digunakan untuk melakukan analisis dan pembacaan atas dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan masalah penelitian dan dokumen-dokumen yang dapat membantu menjelaskan masalah penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau sebagai pembanding, atau penjelas data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terlibat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini setidaknya akan melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:252). Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data, memusatkan perhatian dan penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data-data yang muncul di lapangan terkait dengan peran dan strategi Muslimat dan Fatayat NU dalam

mendulang suara untuk pemengan pasangan Umi-Ardie. Proses ini berjalan terus menerus selama penelitian ini berlangsung untuk secara cermat melakukan penggolongan, penajaman, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk tahap analisis berikutnya.

Tahap berikutnya dari analisis data yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tertentu; naratif-deskriptif, matrik, bagan, jaringan, tabel dan sebagainya sehingga lebih mudah melihat apa yang terjadi di lapangan dan lebih memungkinkan dalam penerikan kesimpulan. Penyajian data ini juga termasuk dalam kegiatan memasukan data-data yang dianggap relevan kedalam bab-bab pembahasan.

Penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah semua tahap diatas dilalui, namun penarikan kesimpulan-kesimpulan kecil terjadi secara terus-menerus selama proses penelitian ini berlangsung hingga mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang kokoh dari keseluruhan hubungan data yang telah direduksi dan disistematisasikan.

Analisis data yang digunakan peneliti lebih melakukan fokus pada wawancara dengan informan kunci tentang bagaimana peran Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan Umi-Ardie pada pilkada Tegal 2018, bagaimana strategi yang digunakan untuk

mempengaruhi pilihan pemilih. Juga diperkuat dengan data dan dokumen yang peneliti dapatkan dari instansi-instansi yang berkaitan dengan pemilu. Analisis yang dilakukan mengacu pada teori-teori substansi akademik yang penulis paparkan di atas yaitu mengkolaborasi teori broker politik dengan teori kesetaraan gender yang disesuaikan dengan data yang ada di lapangan.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan teori-teori politik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang broker politik dan teori kesetaraan gender untuk menjadikan penelitian lebih kuat dan dapat dipercaya baik dari segi akademik maupun empirik. Data-data yang didapat dari penelitian juga sangat membantu dalam perkembangan analisis yang akan menjadi rujukan untuk hasil penelitian dengan menggunakan analisis broker politik.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II Mesin Politik dan Kesetaraan. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana konsep mesin politik dan kesetaraan gender yang akan digunakan sebagai kerangka analisis berpikir dalam penelitian.

BAB III Gambaran umum kabupaten Tegal. bagaimana keadaan sosial histori dari Kabupaten Tegal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai profil Muslimat dan Fatayat NU serta menjelaskan bagaimana dinamika politik (kekuatan politik dari kandidat) pada Pilkada 2018 di Tegal.

BAB IV Peran muslimat dan Fatayat NU sebagai mesin politik. Peneliti akan memaparkan bagaimana pandangan tokoh Muslimat dan Fatayat mengenai organisasi yang terlibat dalam mendukung kemenangan Umi-ardie, juga menjelaskan bagaimana pandangan tokoh Muslimat dan Fatayat NU mengenai konstituen pada Pilkada Tegal dan menjelaskan bagaimana sikap organisasi terhadap Pilkada.

BAB V Mobilisasi Suara Jaringan Perempuan NU. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara dan apa alasan Muslimat dan Fatayat NU menggunakan cara tersebut. Juga dijelaskan dampak positif keterpilihan Umi-Ardie terhadap Muslimat dan Fatayat NU. Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal apa saja yang didapatkan Muslimat dan Fatayat NU setelah mendukung Umi-Ardie pada Pilkada Tegal 2018.

BAB VI Penutup. Dalam penutup ini disajikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis serta saran yang akan disampaikan.

BAB II

MESIN POLITIK DAN KESETARAAN GENDER

Dalam menganalisa kasus peran Muslimat dan Fatayat NU dalam memobilisasi suara untuk kemenangan pasangan Umi-Ardie pada Pilkada Tegal Tahun 2018, peneliti akan menggunakan konsep broker politik dan kesetaraan gender sebagai kerangka teori kajian.

A. Jaringan Perantara

1. Definisi Jaringan Perantara

Jaringan perantara banyak di jumpai dalam proses pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu legislatif atau dalam istilah literatur politik, Edward aspinall menyebutnya sebagai broker politik yang bekerja membantu kandidat pada proses mobilisasi suara.

Broker politik didefinisikan sebagai pekerja kampanye yang termotivasi oleh imbalan materi. Selain itu, broker bekerja untuk mendistribusikan material dari kandidat kepada pemilih (Darwin, 2017:533). Peran broker sangat berpeluang untuk menekankan dan menentukan distribusi material yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Di Indonesia sering dijumpai kandidat yang menggunakan jaringan perantara suara seperti broker. Di tingkat akar rumput broker

memainkan peran sangat vital dalam membangun relasi antara kandidat dan pemilih (Aspinall, 2015:33).

Broker biasanya menggunakan tokoh-tokoh formal/informal atau juga anggota masyarakat biasa yang bekerja atas nama kandidat. Tugas utama mereka adalah membujuk para tetangga atau kenalan mereka untuk memilih sang kandidat. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan uang tunai atau barang patronase (*patronage goods*) dalam bentuk lain atas nama kandidat. Posisi broker sangat penting karena semua kandidat menyadari tidak mungkin berhadapan secara langsung dalam menghadapi konstituen yang sangat besar, oleh karena itu peran broker sangat dibutuhkan untuk bekerja atas nama kandidat dalam mengkampanyekan profil kandidat kepada pemilih (Indiana dkk, 2016: 19).

2. Bentuk Jaringan Perantara

Dalam literatur terdapat tiga bentuk jaringan broker (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 35) yaitu tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial dan partai politik. Namun, untuk penelitian ini peneliti mengkhususkan pada dua jaringan broker, yaitu tim sukses dan jaringan sosial.

a. Tim Sukses

Tim sukses merupakan bentuk dari jaringan broker suara yang paling umum digunakan oleh kandidat. Hampir semua kandidat yang bertarung pada Pilbup

Kab.Tegal 2018 memiliki tim sukses. Tim sukses sering kali disebut dengan nama lain misalnya 'tim kemenangan', 'tim keluarga', dan 'tim relawan'. Tim sukses bersifat personal dan berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual, meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam bentuk kampanye 'tandem'.

Gambaran lainnya adalah struktur teritorial dalam bentuk piramidal dari tim sukses. Biasanya tim sukses untuk kandidat akan menyertakan tim penasehat inti dan para asistennya yang bekerja langsung dengan sang kandidat. Di bawahnya terdapat jumlah kordinator kabupaten/kota, kordinator kecamatan (korcama), kordinator desa (kordes) dan terakhir adalah broker pada akar rumput atau sering disebut sebagai 'kordinator lapangan' (korlap) yang berinteraksi langsung dengan pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:36). Orang-orang yang menduduki posisi strategis dalam piramida ini biasanya bertugas untuk merekrut orang lain dalam rangka mengisi struktur tim sukses yang lebih bawah. Sering kali mereka membidik teman dekat, tetangga, relasi bisnis, keluarga atau relasi-relasi lainnya.

Tujuan utama dari broker adalah menghubungkan kandidat yang berada pada puncak piramida dengan para

pemilih pada level terbawah piramida. Struktur seperti ini digunakan hampir semua kandidat, terutama kandidat yang melakukan praktik pembelian suara. Praktinya, broker pada tingkat dusun atau RT/RW membuat daftar pemilih yang bersedia memberikan suaranya kepada kandidat, memberikan daftar tersebut ke struktur atasannya, membayarkan uang dan memastikan bahwa para penerima datang ke bilik suara di hari pemelihan. Masalah timbal balik antara kandidat dan pemilih juga mempengaruhi relasi antara kandidat dan tim sukses. Kandidat biasanya sangat peduli terhadap isu-isu penggelapan, kelambanan, dan penyelewengan yang dilakukan oleh broker. Masalah-masalah seperti inilah yang membuat kehadiran tim sukses tidak dapat menjamin realisasi dari harapan kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih (Aspinall dan Sukmajati, 2015:37).

Para kandidat lebih bergantung pada jaringan keluarga dan pertemanan dalam membangun tim sukses. Kandidat biasanya akan meletakkan orang-orang yang dia percaya pada lingkaran inti tim. Level selanjutnya adalah orang-orang yang bertugas untuk mencari suara. Pada level paling bawah adalah para broker yang bertugas untuk memasarkan kandidat secara langsung (Hamdi,

2015:409). Setiap orang dalam tim sukses diwajibkan untuk mengamankan keluarganya terlebih dahulu, baru kemudian mengajak teman, tetangga, dan terakhir mengajak siapa saja yang bisa dipengaruhi (Hamdi, 2015: 411).

b. Mesin-Mesin Jaringan Sosial

Selain menggunakan tim sukses yang terorganisir berdasarkan teritori, para kandidat juga sering mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Harapannya, para tokoh ini bisa mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat. Para tokoh masyarakat ini sering kali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintah, misalnya dalam unit-unit pemerintah terendah seperti kepala desa, kepala dukuh, RT atau RW, atau pemimpin dari asosiasi-asosiasi formal, misalnya kelompok keagamaan, para tetua desa, ketua-ketua kekerabatan, pemimpin adat atau orang yang biasa dianggap penting oleh komunitasnya (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 38). Ini senada dengan peran broker dalam strategi penguasaan wilayah yang dilakukan melalui tokoh berpengaruh atau pemimpin formal di lingkungan yang bersangkutan, biasanya melalui ketua RT, ketua RW, ataupun kepala dusun (Hamdi, 2015:405).

Dengan memanfaatkan para tokoh ini, kandidat berharap mereka dapat mendorong para pengikutnya untuk mendukung kandidat tersebut. Dengan kata lain kandidat sering kali memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada. Mereka memanfaatkan kepercayaan sosial (*social trust*) yang ada dalam satu jaringan agar mereka mendapatkan dukungan politik. Kadangkala, para kandidat merekrut tokoh masyarakat yang punya pengaruh di lebih dari satu komunitas atau desa sehingga sebenarnya hal itu tidak cocok dengan format tim sukses yang ada.

Dari hal tersebut, struktur broker setidaknya menggunakan dua rute yang berbeda untuk bisa menjangkau pemilih, yaitu melalui tim sukses (ataupun partai politik) yang terorganisir secara teritorial dan melalui jaringan sosial. Kepercayaan terhadap para tokoh masyarakat biasanya terkait dengan distribusi pemberian *club goods*. Ketika kandidat merekrut pemimpin dari komunitas tertentu, mereka biasanya memberikan sesuatu yang secara kolektif bermanfaat bagi komunitas tersebut. Dengan demikian seorang kepala desa mendukung kandidat dan kandidat membangun jalan di desa tersebut. Sama dengan hal itu, seorang tokoh agama bergabung dengan tim sukses dan kandidat akan memperbaiki tempat

ibadah adri tokoh agama tersebut. Atau, ketua dari kelompok perempuan bergabung dalam tim sukses dan kelompoknya pun menerima donasi alat-alat dapur (Aspinall dan Sukmajati, 2015:39).

Namun demikian, masalah timbal balik, kembali muncul ketika kandidat memanfaatkan para tokoh masyarakat seperti ini. Tokoh masyarakat bisa menerima *club goods* dan mendorong para pengikutnya untuk memilih kandidat yang telah memberi mereka sesuatu, tetapi mereka tidak mampu memastikan adanya dukungan suara karena, misalnya, para pemilih merasa mereka tidak menerima keuntungan personal yang memadai dari pemberian itu. Oleh karena itu beberapa kandidat lebih memilih praktik pembelian suara secara individual kepada tokoh masyarakat yang menjanjikan dukungan suara yang banyak.

3. Cara Kerja Jaringan Perantara

Cara kerja broker dalam mendulang suara salah satunya dengan cara mobilisasi “*by name by address*”. Broker akan melakukan pendataan calon pendukung kandidat dengan mendata warga yang akan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Proses pendataan dilakukan dengan cara mencatat nama dan alamat calon pendukung, ada pula yang meminta fotokopi KPT sebagai bukti, dan ada pula yang

menggunakan mekanisme stiker yang tertempel di rumah sebagai bagian strategi pemetaan calon pendukung (Triantini, 2015: 362).

Ada tiga kategori mobilisasi pendukung *by name by address*. Pertama, terstruktur dan teradministrasi mengikat. Bahwa dalam pola pertama ini tim survey kandidat bertugas mencocokkan data yang masuk dari broker dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dan menyaring data tersebut untuk meminimalisir kesalahan pendataan yang dilakukan oleh broker. Kedua, teradministrasi tidak mengikat. Pola ini banyak dilakukan oleh kandidat baru yang belum banyak mengenal wilayah kerja broker. Broker hanya menyerahkan data berupa nama, alamat, juga nomor KTP dan tidak ada upaya penyaringan data oleh kandidat. Ketiga, disebut pola tidak teradministrasi mengikat karena administrasi pendukung tidak dikelola dengan baik dan hanya terjadi dari mulut ke mulut (Triantini, 2015: 364).

4. Loyalitas Jaringan Perantara

Broker juga memiliki kategori dalam konteks loyalitasnya terhadap kandidat. Jika kategori pada penelitian sebelumnya disebutkan ada tiga kategori broker, yaitu broker aktivis, broker klientelis, dan broker oportunistis, maka Triantini (2015: 365) menyebutkan khususnya di daerah Blora, muncul kategori baru yaitu broker oportunistis ekstrem. Broker jenis ini

adalah broker yang bekerja untuk banyak kandidat demi keuntungan pribadi dan mengakibatkan suara kandidat rusak karena konstituen pendukung hanya berdasarkan pada satu data untuk banyak kandidat.

Dalam beberapa kasus, Triantini (2015: 373) menyebutkan bahwa broker, kader, atau tim sukses perempuan memiliki kecenderungan lebih loyal dari pada laki-laki. Perempuan menjadi broker dalam tim merupakan strategi yang sangat baik. Karena perempuan bekerja lebih militan dibandingkan laki-laki. Selain perempuan juga lebih loyal terhadap dukungan politiknya, sehingga fenomena lompat dukungan ditengah perjalanan itu jarang dilakukan oleh tim sukses perempuan. Broker perempuan menjadi sangat besar manfaatnya dalam kerja pemenangan yaitu menjadi broker penghubung, distributor dan mobilisator.

Pertama, broker menjadi penghubung yaitu berperan penting untuk mengumpulkan informasi kebutuhan pemilih, karena broker punya akses langsung kepada pemilih, Seorang broker perempuan ini menggunakan pola serap informasi dan kebutuhan masyarakat. Biasanya seperti memetakan wilayah dengan tujuan agar tepat sasaran dan dapat menyerap aspirasi kebutuhan di daerah tersebut. Terakhir memetakan masyarakat berdasarkan klasifikasi keberpihakan dukungan. Kedua menjadi distributor yaitu seorang broker perempuan

yang bekerja mendistribusikan material kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politiknya. Ketiga menjadi mobilisator yaitu broker perempuan melakukan kerja mobilisasi perlu menyentuh hal yang paling sensitif terhadap perempuan untuk mendapatkan pengaruh yang maksimal. Bekerjanya broker sebagai mobilisator terlihat baik kampanye akbar, kampanye dialogis maupun kampanye door-to-door. Dari ketiga pola kampanye ini, ketika kampanye akbar sangat terlihat bagaimana proses mobilisasi massa yang diikat dengan material pendukung.

Konsep broker politik membantu peneliti dalam menjelaskan bahwa muslimat dan fatayat sebagai mesin politik (dalam istilah literatur politik, Edward aspinall menyebutnya sebagai broker) yang bekerja membantu kandidat pada Pilkada Tegal. Muslimat dan Fatayat NU yang memiliki basis massa cukup besar kurang lebih berkisar 73 ribu anggota. Ini adalah jumlah yang besar dan dapat menjadi mesin politik penting untuk mendukung kemenangan seorang kandidat, baik sebagai tim sukses atau sebagai broker politik.

Peneliti tidak mau terjebak soal kuantifikasi peran Muslimat Fatayat NU dalam konteks sejauhmana keberadaan muslimat dan fatayat NU itu akan berpengaruh, studi ini uniknya bukan melihat soal apakah eksistensi Muslimat Fatayat NU punya pengaruh terkait berapa persen penyumbangan suara tapi soal

bagaimana kemudian organisasi perempuan NU ini punya andil besar dalam perancangan politik lokal. Muslimat Fatayat NU menarik di kaji karena geliatnya lima tahun belakangan menunjukkan trend yang signifikan masuk dalam ranah politik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tidak terjadi pada organisasi perempuan keagamaan lainnya seperti Aisyiyah di Muhammadiyah. Jadi konsep broker politik ini membantu peneliti dalam melihat sejauhmana perempuan-perempuan di dalam budaya patriarki bisa mengakses sumber daya resource dalam kampanye, bagaimana upaya mempengaruhi konstituen, bagaimana menghadapi pemilih yang mayoritas frameworknya patriarki, dan bagaimana Muslimat Fatayat NU ini masuk dalam sistem untuk mendukung kandidat perempuan.

B. Kesetaraan Gender

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin (Zamroni, 2013: 106). Pengertian lain menyebutkan gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan (Fakih, 1999: 71). Kata gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi (Umriana, dkk, 2016: 40). Jadi, gender bukanlah kodrat atau

ketentuan Tuhan, melainkan berkaitan dengan pola pikir dan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat (Nugroho, 2011: 4).

Menurut Rahmadewi (dalam Umriana, dkk, 2016: 42) pemahaman gender erat kaitannya dengan persoalan kesetaraan dan kesamaan. Persamaan dalam hal ini adalah persamaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, persamaan status sosial dalam kesempatan kerja dengan memperhatikan kodrat perempuan seperti hamil, melahirkan dan menyusui, serta persamaan dalam hukum, politik sosial dan budaya. Pemahaman selanjutnya mengenai kesetaraan. Kesetaraan dalam pemahaman ini menunjuk pada kondisi seimbang dan sederajat atau sejajar. Jadi kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan (Puspitawati, 2012:23). Sementara Nugroho (2011: 29) mengartikan kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

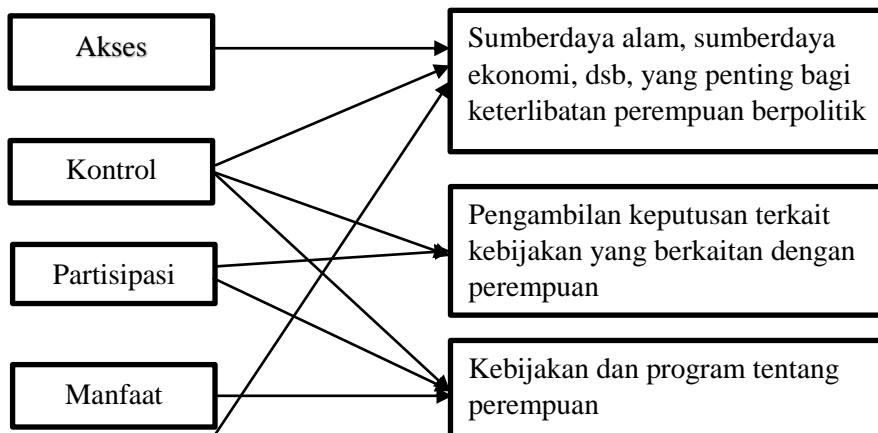
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, artinya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan. Memiliki akses berarti kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Berpartisipasi artinya ikut serta dalam proses sosial, politik dan ekonomi pada masyarakat. Sedangkan kontrol dan manfaat berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya (Nugroho, 2011: 30).

Hal tersebut senada dengan kebijakan pemerintah Indonesia melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari menyusun perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan (Rusmadi, 2016: 95). Implementasi

pengarusutamaan gender dilakukan dengan memasukan 4 (empat) indikator pengarusutamaan gender. Selengkapnya dapat dilihat sebagaimana diagram berikut ini :

Diagram 1. Implementasi Pengarusutamaan Gender



Sumber: Rusmadi, 2016: 95, dimodifikasi peneliti.

Perlunya optimalisasi langkah-langkah pengarusutamaan gender sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan agar perempuan tidak mengalami kerentanan lebih akibat dampak sekaligus juga akibat kebijakan-kebijakan yang kurang responsif terhadap gender. Dalam kondisi saat ini, masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana perempuan itu rasional, emosional dan lemah lembut, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa (Nugroho, 2011: 9). Perbedaan gender tidak akan menjadi sebuah masalah jika adanya pembagian tugas yang

baik dan seimbang, tidak mengabaikan hak laki-laki maupun perempuan. Sebab peran laki-laki dan perempuan akan menguntungkan dan bermanfaat bagi keduanya khususnya bagi pembangunan bangsa dan Negara dalam mengimplementasikan kesetaraan gender (Marlina, 2015: 10).

Al-qu'an sebagai pedoman bagi orang muslim juga sangat memperhatikan harkat dan martabat seorang perempuan. Perempuan diperbolehkan terlibat dalam dunia politik termasuk menjadi pemimpin seperti Umi yaitu menjadi Bupati Tegal. Hal tersebut tertunag pada QS. Annisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalil Al-Qur'an ini menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, ternyata menurut kalangan ahli tafsir memiliki makna yang tidak tunggal. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan ayat yang memiliki arti *“karena Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian (perempuan) yang lain, dan karena laki-laki memberi nafkah”*. Melihat penggalan arti dari ayat ini, setidaknya ada dua alasan mengapa terjadi kepemimpinan laki-laki. Pertama, karena laki-laki menafkahi dan kedua karena laki-laki pada masa itu memiliki akses lebih kepada dunia publik dibandingkan perempuan. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat bersifat sosiologis dan historis, tidak normatif. Artinya kalau kondisi sosiologis dan historisnya berubah yang menyebabkan perempuan memiliki kemampuan memberi nafkah dan juga memiliki kelebihan akses di ranah publik, maka kepemimpinan perempuan bisa terjadi pada lingkup yang lebih umum, seperti menjadi bupati (Farih, 2009:132).

Telah banyak upaya yang dilakukan dalam proses pengimplementasian kesetaraan gender baik pada level internasional dan nasional. Secara Internasional, Konvensi PBB-

Convention On Political Rights for Women dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) diadopsi sejak Tahun 1952-1979. Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan. Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya, termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum (Rahmatunnisa, 2016:90).

Secara nasional, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bentuk dari pengakuan adanya kesetaraan gender yaitu dengan menerapkan sistem kuota (*Affirmative Action*). *Affirmative Action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti di balik sistem ini adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar “tanda” dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau prosentase dari anggota suatu badan apakah itu suatu daftar kandidat (calon legislatif), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan paling tidak suatu minoritas kritis (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan

temporer. Apabila hambatan struktural terhadap perempuan telah dapat disingkirkan, maka kuota tidak perlu digunakan lagi (Artina, 2016: 131).

Menurut Allen dan Cutts (2018: 162) tentang efek kuota, menunjukkan bahwa adanya efek positif terhadap perempuan dalam ranah politik dan dapat membantu menormalkan kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam politik terlepas dari kebijakan yang dihasilkan oleh perempuan setelah berpolitik. Selain itu, wacana publik seputar implementasi kuota mungkin memiliki efek peningkatan kesadaran, memicu diskusi publik tentang masalah tersebut. Bagi para pendukung kuota, temuan ini menunjukkan adanya nilai kebermanfaatannya yang membuat publik secara umum merasa lebih positif tentang kemampuan perempuan untuk memegang posisi kekuasaan politik.

Konsep kesetaraan gender ini digunakan peneliti untuk melihat bagaimana perempuan Muslimat dan Fatayat NU ini masuk ke dalam sekat-sekat kultur patriarkhi. Konsep ini juga membantu peneliti melihat apakah perempuan-perempuan NU punya kesetaraan dalam mengakses sumber daya dalam kampanye, memiliki kontrol terhadap sebuah kebijakan, terlibat aktif dalam komunitas dalam upaya memobilisasi suara pemilih laki-laki dalam memilih kandidat perempuan.

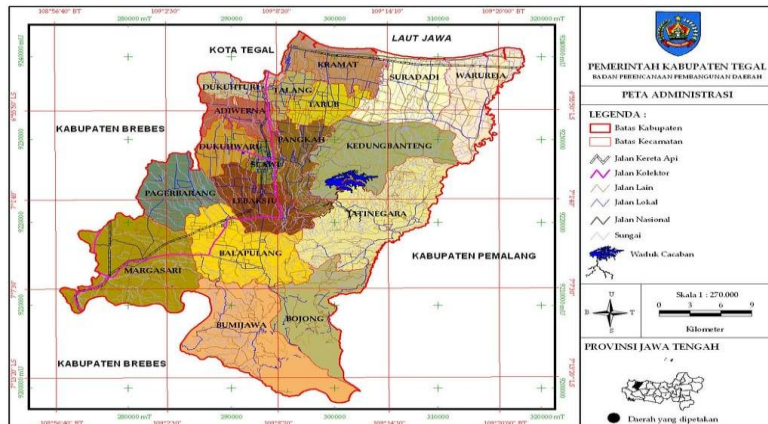
BAB III

SETING SOSIAL POLITIK KABUPATEN TEGAL

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, berdiri pada tanggal 18 Mei 1601 pada saat Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru demung di Tegal oleh Sultan Mataram. Tegal adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota Slawi. Secara geografis Kabupaten Tegal memiliki luas 878,7 km² terletak di pesisir utara pulau Jawa yang juga berbatasan langsung dengan beberapa daerah seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal dibagi menjadi 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa.

Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal



Sumber: Data Sekunder

Dari 18 kecamatan tersebut, secara topografi terbagi atas beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja.
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warureja, Kedungbanteng, dan Pangkah.
3. Daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Tegal terbilang padat. Meskipun realita yang terjadi kebanyakan

masyarakat Kabupaten Tegal merantau ke kota besar seperti Jakarta untuk bekerja misalnya membuka warung tegal (Warteg). Berdasarkan data statistik Kabupaten Tegal jumlah penduduk Kabupaten Tegal berturut-turut mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai 1.429.386 jiwa, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.433.515 jiwa, selanjutnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2018 mencapai 1.437.225 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai 1.566.587 jiwa dengan jumlah laki-laki 797.017 dan perempuan 769.570 jiwa (BPS Kabupaten Tegal).

Penduduk Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki mendominasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan berkisar diangka 27.537 jiwa. Selengkapnya pada tabel jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1.	Adiwerna	66.073	63.465	129.538
2.	Balapulang	47.215	45.565	92.780

3.	Bojong	36.566	34.696	71.262
4.	Bumijawa	47.921	44.839	92.760
5.	Dukuhturi	50.037	47.505	97.542
6.	Dukuhwaru	34.137	33.206	67.343
7.	Jatinegara	30.481	28.702	59.183
8.	Kedungbanteng	22.949	22.197	45.146
9.	Kramat	57.116	56.172	113.288
10.	Lebaksiu	47.491	47.202	94.693
11.	Pagerbarang	31.395	30.789	62.184
12.	Pangkah	56.465	54.573	111.038
13.	Margasari	54.503	53.173	107.676
14.	Slawi	38.733	38.615	77.348
15.	Suradadi	46.967	44.762	91.729
16.	Talang	52.351	49.930	102.281
17.	Tarub	43.171	42.049	85.220
18.	Warureja	33.446	32.130	65.576
	Total	797.017	769.570	1.566.587

(Sumber: BPS Kabupaten Tegal)

Tegal terkenal dengan basis massa Nahdlaul Ulama yang cukup besar. Dibuktikan dengan berdirinya banyak pondok pesantren yang mana sebagian besar para pengasuh pondok adalah dari kalangan nahdliyin. Berbicara soal kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Tegal, sebagian masyarakat Kabupaten Tegal menjalankan budaya-budaya yang ajarkan oleh Walisongo, salah satunya budaya tahlilan dan *dzibaan*.

Tahlilan adalah sebuah seremonial sederhana yang dilakukan oleh warga apabila ada tetangganya ada yang meninggal. Tujuan dari adanya tahlilan adalah sebagai bentuk

mendoakan orang yang sudah meninggal. Rentetan acara dari tahlilan untuk orang yang meninggal itu diawali dari tiga hari pasca kematian disebut *nelung dino*, tujuh hari pasca kematian disebut *mitung dino*, 40 hari pasca kematian disebut *matangpuluh dino*, 100 hari pasca kematian disebut *nyatus*, dan terakhir 1000 hari setelah kematian disebut *mendhak*. Selain bertujuan mendoakan orang yang sudah meninggal, tujuan lain dari adanya tahlilan untuk mempererat tali silaturahmi sesama muslim.

Tradisi lain yang dilakukan warga Tegal adalah *dzibaan*. *Dzibaan* adalah acara membaca berzanji baik di musholah atau di rumah yang di tujukan untuk memuliakan dan menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. Pada acara ini masyarakat muslim Tegal beramai-ramai memanjatkan sholat untuk Nabi Muhammad SAW mengharapkan syafaat di hari akhir nanti. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat iman juga menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wadah untuk bersilaturahmi untuk warga sekitar.

Kabupaten Tegal memiliki penduduk yang heterogen terdiri beberapa campuran etnis, seperti etnis Jawa, Cina, Arab dan lainnya. Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal adalah suku Jawa. Selain itu Kabupaten Tegal mempunyai beragam agama yang dianut seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Agama yang dianut mayoritas penduduk Kabupaten Tegal Adalah Islam. Dimana setiap kecamatan di Kabupaten Tegal memiliki

prosentase diatas 97% beragama Islam. Di Kabupaten Tegal hanya satu kecamatan yang memiliki prosentase 100% beragama Islam yaitu di Kecamatan Jatinegara.

Tabel2. Presentase Penduduk Menurut Kecmatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tegal

Presentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tegal, 2018							
	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
010	Margasari	99,55	0,29	0,10	0,01	0,05	0,00
020	Bumijawa	99,98	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
030	Bojong	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Balapulng	99,80	0,11	0,07	0,00	0,02	0,00
050	Pagerbarang	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
060	Lebaksiu	99,96	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
070	Jatinegara	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Kedungbanteng	99,84	0,06	0,08	0,02	0,00	0,00
090	Pangkah	99,64	0,18	0,17	0,00	0,01	0,00
100	Slawi	95,62	1,55	1,45	0,62	0,48	0,28
110	Dukuhwaru	99,86	0,02	0,07	0,02	0,03	0,00
120	Adiwerna	99,28	0,63	0,06	0,01	0,02	0,00
130	Dukuhturi	99,89	0,05	0,05	0,00	0,01	0,00
140	Talang	99,62	0,22	0,16	0,00	0,00	0,00
150	Tarub	99,95	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00
160	Kramat	97,65	0,67	1,29	0,20	0,14	0,05
170	Suradadi	99,96	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
180	Warureja	99,89	0,09	0,02	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Sedangkan berdasarkan laporan BPS Kabupaten Tegal mengenai kategori pekerjaan penduduk Kabupaten Tegal dikategorikan dalam beberapa jenis pekerjaan. Untuk jumlah

paling besar terdapat pada Industri Pengolahan yang mencapai 149.754 jiwa, disusul dari sektor Perdagangan dengan jumlah 120.927 jiwa. Posisi ketiga di tempati Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan yang berjumlah 107.929. keempat ditempati sektor Kontruksi dengan jumlah 47.779 jiwa sedangkan yang terendah adalah Pertambangan dan Penggalian mencapai 7.490 jiwa. (Tegal Dalam Angka 2019). Tabelnya sebagai berikut:

Tabel3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian di
Kabupaten Tegal

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	77.840	30.089	107 929
2.	Pertambangan dan Penggalian	7490	-	7 490
	Industri Pengolahan	83.598	66.156	149 754
	Konstruksi	47.779	-	47 779
	Perdagangan	53.773	67.154	120 927
	Transportasi dan Pergudangan	26.239	-	26 239
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.944	29.313	63 257
	Total	330.663	192.712	523 375

Sumber: BPS Kabupaten Tegal dikelola Peneliti

B. DINAMIKA POLITIK PILKADA KABUPATEN TEGAL 2018

1. Profil Kandidat

Pilkada serentak yang diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia Tahun 2018, khususnya di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Tegal menampilkan tiga pasangan calon yang bertaruh merebutkan kursi eksekutif lokal yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Pada hari terakhir pendaftaran yaitu Rabu 10 Januari 2018, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal telah mendaftar diri di KPU Kabupaten Tegal. Mereka adalah pasangan petahana Enthus-Umi, Rusbandi- Fatkhudin dan Haron Bagas Prakoso- Drajat.

Pada hari senin 14 Mei 2018, calon bupati nomor urut 3 Ki Enthus Susmono meninggal dunia karena serangan jantung. DPC PKB Kabupaten Tegal akhirnya sepakat mengajukan nama Sabilillah Ardie sebagai pengganti almarhum Enthus Susmono pada pilkada 2018 mendatang. Mantan staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu akan maju sebagai calon wakil bupati nomor urut 3. Sedangkan Umi Azizah, yang awalnya menjadi calon wakil bupati naik menjadi calon bupati menggantikan posisi yang ditinggalkan Enthus.

Sebelumnya, ada enam nama yang muncul menjadi bakal calon Wakil Bupati Tegal. Antara lain Bahrudin Nasori (anggota DPR RI F-PKB/ pengurus DPP PKB), A Firdaus Assyairozi (Ketua DPC PKB/ Ketua DPRD Kabupaten Tegal), Ahmad Wasari (Ketua PCNU/ Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal). Kemudian ada nama seorang dokter yang juga pengusaha Edi Utomo, Widodo Joko Mulyono (Sekda Kabupaten Tegal), dan Nurrohman (pengusaha). Pertimbangan memilih nama Sabilillah Ardi karena didasari tenggat waktu yang diberikan KPU untuk memilih pengganti sangat singkat, hanya sepekan (Priyanto, 2018). Pada minggu malam 20 Mei 2018, pasangan calon nomor urut 3 Umi-Ardie mendaftarkan diri dengan memberikan berkas verifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (Abineri, 2018).

Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Umi Azizah-Sabilillah Ardie resmi ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati (pilbup) Tegal 2018. Penetapan tersebut digelar oleh KPU Kabupaten Tegal dalam Rapat Pleno Terbuka Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tegal 2018 di Gedung PMI Kabupaten Tegal, Slawi, Rabu (25/7/2018) siang. Keputusan tersebut tertuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 105/PL.03.7-

BA/3328/KAB/VII/ 2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2018 (Gumilang, 2019).

Pasangan Umi – Ardie merupakan pasangan terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. Saat ini Umi Azizah merupakan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal. Sedangkan Sabilillah Ardie tercatat sebagai Wakil Bendahara PP Lembaga Perekonomian PBNU. Keduanya akan memimpin jalannya Pemerintahan Kabupaten Tegal untuk masa jabatan 2019-2024. Sebelum berkecimpung di ranah politik, Umi lebih dulu mengawali kiprahnya dengan mendedikasikan diri aktif di organisasi kemasyarakatan perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Kabupaten Tegal. Tercatat, selama dua periode, alumnus Fisip Undip ini terpilih menjadi ketua PC Fatayat NU, yaitu tahun 1987-1992 dan 1992-1997. Kepiawaian Umi memimpin organisasi ini juga tercermin lewat kepemimpinannya sebagai Ketua PC Muslimat NU Kabupaten dari tahun 2005 hingga sekarang.

Sebagai pemimpin organisasi wanita terbesar di Kabupaten Tegal ini Umi tidak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tapi juga fokus pada pembenahan dan penguatan manajemen organisasi hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Tak berhenti sampai disitu, wanita kelahiran 1960 ini selama menjabat sebagai wakil bupati juga dikenal aktif mengawal berbagai program sosial kemasyarakatan seperti

penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kebencanaan hingga pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Sebagai wakil bupati, tidak sedikit prestasi yang ditorehkan Umi yang di masa remajanya diisi dengan berdagang dan membuat manisan buah, salah satunya adalah membidani lahirnya badan amil zakat di Kabupaten Tegal. Deretan prestasi Pemkab Tegal juga tidak terlepas dari tangan dingin Umi dan gaya kepemimpinannya yang mengayomi, sampai kemudian Umi dilantik menjadi Bupati Tegal tanggal 5 November 2018 meneruskan periode Enthus-Umi melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7765 Tahun 2018, dimana untuk pertama kalinya pula Kabupaten Tegal meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di penghujung tahun 2018.

Atas dorongan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak korupsi, juga ketulusan hatinya dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal yang lebih berkeadilan, perjalanannya menuju tampuk kepemimpinan melalui kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2018 pun diraihinya dengan mudah, mendominasi hingga 71 persen suara sah.

Sementara itu Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardi merupakan sosok pria asli Lebaksiu Kabupaten Tegal. Ia merupakan cucu dari ulama ternama di Babakan, yaitu KH. Nasori. Kehadiran Ardi diyakini mampu menjadi daya tarik tersendiri dalam membina generasi muda. Alumnus Temple University Philadelphia Amerika Serikat ini sejak kecil memang lebih banyak menghabiskan masa sekolahnya di Kota Kembang Bandung.

Selain sebagai Pengurus PP LPNU pusat , Ardi pernah menjadi Tenaga Ahli DPR RI dan Staf Khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Tahun 2009-2014, Ardi juga memiliki usaha di bidang pengembangan teknologi informasi lewat perusahaannya PT. Mega Kapital Utama dan PT. Barari Utama Global.

Pria kelahiran tahun 1983 ini resmi membantu Bupati Tegal Umi Azizah menjalankan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 untuk mencapai visinya menuju masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia, dengan slogannya “mbangun berkah, gawe bungah” (Yandip Prov Jateng, Januari:2019)

2. Koalisi Besar Partai Politik pada Pilkada Tegal 2018

a. Napak Tilas Dua Partai Besar di Kabupaten Tegal

Jika melihat kebelakang, dinamika politik lokal Kabupaten Tegal juga tidak hanya dimonopoli oleh satu partai. Setidaknya pada saat pasca reformasi hajatan demokrasi seperti pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif, terjadi kompetisi oleh berbagai partai, namun cenderung dikuasai oleh dua partai yang bergantian berkuasa di DPRD Kabupaten Tegal, yakni PDI-P dan PKB. Dinamika tersebut dapat dilihat dengan partisipasi partai-partai tersebut dalam pemilihan anggota legislatif terhitung sejak reformasi hingga tahun 2014. Pada pemilu legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil mengirim kader-kadernya untuk menduduki dan mendominasi lembaga legislatif sekaligus menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tegal untuk masa 5 tahun hingga tahun 2004. Pada pemilihan legislatif selanjutnya yaitu tahun 2004, terjadi pergeseran dominasi dari PDI-P ke PKB. PKB berhasil merebut dan menguasai DPRD Kabupaten Tegal untuk periode 2004-2009. Komposisi DPRD Kabupaten Tegal periode 2004-2009 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tegal
Periode 2004-2009

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	PKB	14
2.	PDI-P	12
3.	Golkar	6
4.	PAN	5
5.	PKS	4
6.	PPP	4

Sumber: KPU Kab.Tegal dikelola Peneliti

Diperhelatan pemilu legislatif tahun 2009, kembali PDIP merebut dominasi di lembaga legislatif Kabupaten Tegal untuk periode 2009-2014 dengan menempati 13 kursi DPRD Kabupaten Tegal. Sedangkan PKB menempatkan 8 kadernya di DPRD Kabupaten Tegal. Dominasi komposisi DPRD Kabupaten Tegal kembali berpindah dari PDI-P ke PKB pada pemilihan dewan legislatif tahun 2014. PKB berhasil menggulingi seteru politiknya sejak era reformasi meskipun berbeda tipis, yaitu satu kursi. Komposisi perolehan kursi lembaga legislatif Kabupaten Tegal periode 2014-2019 sesuai nomor urut partai tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Komposisi Anggota DPRD Periode 2014-2019

No.	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Demokrat	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	12
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11
5.	Partai Golongan Karya	6
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
7.	Partai Demokrat	3
8.	Partai Amanat Nasional	2
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3
11.	Partai Bulan Bintang	0
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

Sumber: KPU Kab. Tegal dikelola peneliti

Dengan demikian, konstelasi politik di Kabupaten Tegal dari tahun 2014 hingga tahun 2019 di dominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, karena di tahun dan periode yang sama kursi Bupati dan Wakil Bupati diduduki oleh kader dari partai bumi yang dikelilingi sembilan bintang

tersebut, yakni Enthus Susmono dan Umi Nurazizah. Berangkat dari sejarah dua partai besar tersebut berkuasa di Kabupeten Tegal, pada konteks Pilkada Tegal 2018, di mana Umi-Ardie kembali maju dalam pertarungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal menggantikan Enthus kemungkinan ada sedikit banyak peran dari partai pengusung yaitu PKB dalam pencalonan Umi-Ardie.

b. Gambaran Partai Pendukung pada Pilkada Tegal 2018

Peran partai politik dalam kontestasi Pilkada Tegal tahun 2018 juga perlu mendapat tempat bagi jalannya sistem politik modern. Sebagai mesin politik yang diorganisasikan untuk memenangkan pemilihan dan meraih kekuasaan, partai politik ada di negara-negara modern. Sederhananya, partai politik menjadi bagian dalam sistem politik modern. Dalam sistem politik modern, kader-kader partai politik banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Secara umum partai politik tidak hanya sebatas kendaraan untuk mencapai kekuasaan, di mana dengan besarnya akses yang dimiliki partai politik, muncul juga tanggung jawab sosial yang harus diemban, terkait hubungannya dengan masyarakat.

Partai politik mempunyai fungsi-fungsi, jika dikaitkan dengan Pilkada Kabupaten Tegal 2018, idealnya

fungsi yang harus dilaksanakan oleh koalisi besar partai politik yang berkontribusi dan mendukung pasangan Umi-Ardie adalah melakukan sosialisasi politik, partisipasi politik dan komunikasi politik dengan masyarakat umum atau konstituennya, yang semuanya bermuara pada usaha bagi kemenangan pasangan Umi-Ardie.

Terkait Pilkada tegal Tahun 2018, tiga pasangan calon tersebut maju di dukung oleh koalisi partai politik. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu bahwa sepasang kandidat hanya dapat mencalonkan diri jika didukung oleh partai atau koalis partai yang memiliki setidaknya 20 persen dari total kursi di parlemen daerah atau memperoleh 25 persen dari total suara di daerah pemilihan umum maka di bolehkan untuk ikut dalam kontestasi pilkada.

Secara umum dalam mencermati Pilkada Kabupaten Tegal 2018, terjadi polarisasi partai-partai politik secara tidak seimbang, yaitu hampir semua partai-partai politik masuk dalam koalisi besar untuk mendukung pencalonan Umi-Ardie. Pasangan Rusbandi-Fathudin didukung oleh koalisi Partai Golkar dengan 6 kursi dan PPP dengan 4 kursi di parlemen daerah. Pasangan Harun Bagas Prakoso-Drajat didukung oleh koalisi partai PDIP dengan jumlah perwakilan di

parlemen daerah 11 kursi, Nasdem dengan 1 kursi, dan Demokrat terwakili 3 kursi. Terakhir pasangan Umi-Ardie di dukung oleh koalisi partai PKB dengan 12 kursi, Gerindra 5 kursi, PKS 3 kursi, PAN 2 kursi dan Hanura 3 kursi. Ketua KPU Kabupaten Tegal, Sukartono, menyatakan secara substansi ketiga pasangan calon telah memenuhi syarat ketentuan jumlah minimal kursi di DPRD yang berjumlah 10 (Priyanto, Januari 2018).

Jika kita melihat partai-partai pengusung ketiga kandidat pada Pilkada Tegal 2018, bisa dikatakan terdapat tiga kelompok partai dengan basis massanya masing-masing. Rusbandi-Fathuddin didukung oleh partainya orang-orang priyai. Orang Tegal menyebutnya Golkar itu untuk golongan sekelas PNS atau menengah keatas sedangkan PPP merupakan perwakilan partai Islam yang tidak semoderat PKB. Pasangan Bagas-Drajat secara tegas menasar pemilih yang Nasionalis terlihat jelas dari partai-partai koalisinya yang secara penuh diisi partai-partai Nasionalis, terkahir Umi-Ardie adalah pasangan yang di usung oleh PKB dan didukung oleh PKS, PAN, Hanura dan Gerindra. Umi-Ardie didukung oleh komposisi partai yang berbasis Agama sekaligus berbasis massa Nasionalis. Umi-Ardie mendapat sumbangsih dari PKB karena Kabupaten Tegal mayoritas orang NU yang

berafiliasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa yang notabennya partainya orang NU dan partai yang berbasis Islam.

Partai-partai Islam yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Tegal 2018 secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu partai-partai yang secara kultural terkoneksi dengan organisasi Islam yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Tegal (seperti PKB dengan NU, PAN dengan Muhammadiyah) serta partai-partai yang menjadikan Islam sebagai asas dalam Anggaran Dasarnya (PKS dan PPP) sehingga mereka tidak hanya menjadi partai Islam, tetapi mereka juga menjadi partai umat Islam. Pada satu sisi, terdapat partai yang bertujuan merepresentasikan kepentingan umat Islam dalam pemerintahan di sisi lain terdapat partai yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai sekaligus berusaha mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam cara maupun kebijakan negara.

Sebaliknya, tujuan PAN dan PKB secara ideologis tidak hanya lebih moderat, tetapi juga lebih spesifik pada upaya untuk mewedahi kepentingan organisasi dan komunitas yang terkoneksi dengan partainya. Hal ini dapat tergambarkan dari pernyataan Hj.

Barokah, seorang juru kampanye Umi yang berasal dari Pengurus Ranting Muslimat NU yang secara sederhana menyampaikan bahwa PKB adalah kendaraan politiknya orang NU (Wawancara, Juru Kampanye Tegal 25 November 2019).

Hal ini tergambar pada retorika tentang nilai-nilai Keislaman yang dilakukan para juru kampanye yang berimbas cukup efektif dalam upaya mempengaruhi pilihan pemilih. Seperti yang dilakukan Hj. Barokah saat melancarkan pidatonya dalam acara blusukan turun ke pengajian rutin yang dilakukan di beberapa desa ke desa. Juru kampanye Umi ini menyampaikan bahwa kita orang NU tidak sepatutnya tidak menudukung Umi yang sudah dilamar oleh sembilan kyai besar NU di Kabupaten Tegal. Umi diusung PKB. PKB adalah kendaraannya orang NU.

3. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal 2019

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal di helat pada 27 Juni 2018 di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kontestasi Pilkada Tegal Tahun 2018 diikuti sebanyak 1.171.026 pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan rincian 592.154 (50,6%) laki-laki dan 578.872 (49,4%) perempuan.

Mereka akan menggunakan hak suaranya di 2.577 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 6. Sebaran Pemilih Pilkada 2018 Kabupaten Tegal

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Adiwerna	21	197	48.228	46.841	95.069
2.	Balapulang	20	160	36.743	35.375	72.118
3.	Bojong	17	130	27.568	26.524	54.092
4.	Bumijawa	18	178	36.234	34.285	70.519
5.	Dukuhturi	18	159	36.500	35.080	71.580
6.	Dukuhwaru	10	104	25.370	25.358	50.728
7.	Jatinegara	17	117	23.895	23.073	46.968
8.	Kedungbanteng	10	75	17.513	17.019	34.532
9.	Kramat	20	173	40.389	40.285	80.674
10.	Lebaksiu	15	143	35.802	35.507	71.309
11.	Pagerbarang	13	104	24.299	24.105	48.404
12.	Pangkah	23	175	40.946	40.245	81.191
13.	Margasari	13	171	40.462	49.966	90.428
14.	Slawi	10	122	26.969	27.703	54.672
15.	Suradadi	11	161	36.273	35.505	71.778
16.	Talang	19	162	37.392	36.061	73.453
17.	Tarub	20	142	32.281	31.560	63.841
18.	Warureja	12	104	25.292	24.381	49.673
	Total	287	2.577	592.154	578.872	1.171.026

Sumber : KPU Kabupaten Tegal.

Berdasarkan tabel di atas, pemilih berjenis kelamin laki-laki mendominasi di 16 kecamatan, artinya pemilih laki-laki hak suaranya lebih banyak dari pada jumlah pemilih perempuan, namun memiliki selisish tidak begitu besar. Sedangkan di Kecamatan Margasari dan Slawi, pemilih

perempuan berjumlah lebih banyak dari pada pemilih laki-laki kurang lebih berselesih di angka 8 ribu pemilih.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal digelar bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2018. Terakait dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018, partisipasi masyarakat Kabupaten Tegal meningkat menjadi 65% dari Pilbup Tegal 2013 yang hanya 54%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat yang ikut menyosialisasikan pelaksanaan Pilbup Tegal 2018. Hasil rekapitulasi suara Pilbup Tegal 2018 bahwa jumlah suara sah dari ketiga pasangan calon 730.172, sedangkan yang tidak sah 39.727 suara. Jika disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pilbup 2018 sebanyak 1.184.586 pemilih, tingkat partisipasi masyarakat 65%. Target partisipasi pemilih seara Nasional adalah 75% namun belum terpenuhi disebabkan beberapa faktor diantaranya karena waktu pencoblosan yang bertepatan dengan warga Tegal sudah kembali merantau setelah mudik Lebaran. Halitu mengingat tenggang waktu pencoblosan dengan Lebaran terpaut dua pekan. Faktr lain juga karena banyak nelayan tradisional yang berangkat melaut terutama wilayah Munjunggung, Kramat dan Suradadi. Juga perohal Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita yang

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap namun, tidak pulang saat hari pemilihan. Terakait hasil partisipasi pemilih mencapai 65% merupakan sesuai target yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Apratur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Tegal dinyatakan netral oleh pengawas. Hal ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dari ASN terhadap kandidat manapun dan proses penyelenggaraan Pilkada Tegal 2018 berjalan dengan aman, kondusif dan damai (Gumilang, 2018).

Pasangan Umi Azizah-sabillah Ardie bukan pasangan yang semula didaftarkan ke KPU untuk maju pada Pilbup Tegal. Pasangan ini baru ditetapkan sekitar sebulan menjelang pemungutan suara, namun demikian pasangan ini sukses mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan kemenangan telak. Rekapitulasi perhitungan suara Pilbup Kabupaten Tegal di lakukan di gedung Korpri Tegal pada Hari Kamis, 05 Juli 2018. Terkait dengan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 03 Umi-Ardie memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 518.017 suara atau 70,94%. Sedangkan pasangan nomor urut 02 Bagas-Drajat memperoleh 148.000 suara atau 20,27% dan untuk pasangan calon nomor urut 01 Rusbandi-Fattahudin hanya memperoleh 64.155 suara atau 8,79%. Umi-Ardie unggul dibanding dua paslon lainnya dan pasangan ini menguasai suara di semua kecamatan di Kabupaten Tegal.

Tabel7. Daftar Perolehan Suara Pada Pilkada Tegal 2018

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1.	Rusbandi-Fatahuddin	64.155
2.	Bagas-Drajat	148.000
3.	Umi-Ardie	518.017
	Jumlah Suara Sah	730.172
	Jumlah Suara Tidak sah	39.727
	Jumlah Suara Sah + Jumalh Suara Tidak Sah	769.899

Sumber: KPUD Kabupaten Tegal dikelola Peneliti

C. PROFIL FATAYAT DAN MUSLIMAT NU KABUPATEN TEGAL

1. Sejarah Muslimat NU

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya, tepatnya di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah (Amin, 1996:52). Faktor lahirnya NU didorong oleh kalangan pesantren dalam mempertahankan kelangsungan madzhab dan menolak keputusan raja Ibn Su'ud atas penghapusan mazdhab. Hal tersebut telah membuat NU dikenal sebagai organisasi bercorak tradisional (Ridwan, 2010:33).

NU didirikan oleh kalangan Ulama sebagai wadah bagi kalangan pesantren. Sejak awal kelahirannya tidak terlepas dari budaya patriarki. Terlihatnya budaya patriarki dalam NU

terwujud pada eksistensi kaum laki-laki yang lebih menonjol dari kaum perempuan dalam organisasi tradisional tersebut. Kurang terangkatnya kaum perempuan di dalam NU dapat ditelusuri melalui perkembangan perempuan di dalam organisasi ini (Wilar, 2009:32).

Eksistensi perempuan NU mulai terlihat setelah dua belas tahun pasca lahirnya NU tepatnya kongres di Menes tahun 1938. Pada kongres tersebut terdapat catatan tentang kiprah para perempuan di forum resmi itu, sehingga acara kongres itu menjadi tonggak penting lahirnya Muslimat NU. Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang anggota Muslimat NU diatas podium berbicara tentang perlunya wanita NU mendapat hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU.

Sejarah mencatat bahwa Kongres NU di Menes tahun 1938 merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki. Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang

cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.

Dalam kongres itu, untuk pertama kali tampil seorang Muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Verslag Kongres NU XIII mencatat, *“Pada hari Rebo ddo : 15 Juni '38 sekira poekoel 3 habis dhohor telah dilangoengkan openbare vergadering (dari kongres) bagi kaoem iboe, ... Tentang tempat kaoem iboe dan kaoem bapak jang memegang pimpinan dan wakil-wakil pemerintah adalah terpisah satoe dengan lainnja dengan batas kain poetih.”*

Sejak kongres NU di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU XV di Surabaya 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat NU yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan

usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan Muslimat NU belum lagi didapat. Dahlan lah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat NU untuk ditandatangani Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari dan KH A Wahab Chasbullah. Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama A Aziz Dijar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Muslimat NU di kemudian hari.

Bersamaan dengan hari penutupan Kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret 1946/26 Rabiul Akhir 1365. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara. Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, istri Dahlan. Dia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU selama dua tahun memimpin Muslimat NU sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat berharga

dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Pada Mukhtamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.

a. Visi Muslimat NU

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT. Sementara misi dari Muslimat NU adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

4. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.

Muslimat NU dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan organisasi tersebut, memaksimalkan keberadaan sayap-sayapnya sebagai ujung tombak pencapaiannya, yaitu yayasanyayasan sebagai berikut:

a) Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) yang bergerak di bidang Kesejahteraan dan Sosial, b) Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPM NU) yang bergerak di bidang Pendidikan, c) Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU (HIDMAT NU) yang bergerak di bidang Dakwah²⁴ d) INKOPAN NU yang bergerak di bidang Koperasi dan Usaha, serta e) Yayasan Haji Muslimat NU dan Ikatan Haji Muslimat NU yang bergerak di bidang Silaturahmi dan Penelolan Jamaah Ibadah Haji dan umroh (Materi Rakernas 2014 PP. Muslimat NU, hlm. 11).

Tabel 8. Aset Muslimat NU Kabupaten Tegal

No.	Aset	Jumlah
1.	YPM NU Bina Bakti Wanita	
	a. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)	530
	b. Taman Kanak-kanak (TK)	85
	c. Raudhatul Atfal (RA)	46
	d. Kelompok Bermain Muslimat	52
	e. Keaksaraan Fungsional	97
2.	Yayasan Haji Muslimat NU	

	a. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muslimat NU	1
	b. Ikatan Hajah Muslimat NU	1
3.	Yayasan Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU	
	a. Majelis Taklim Muslimat NU	1244
4.	Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU	
	a. Panti Asuhan Darul Yatama	1
	b. Pembinaan di Beberapa Pondok Pesantren	

Sumber: PC Muslimat NU Kabupaten Tegal dikelola peneliti

2. Fatayat NU Kabupaten Tegal

Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 H, bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 M. Pimpinan Pusat Fatayat NU berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fatayat Nahdlatul Ulama bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai *Jam'iyah Diniyah* beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jamaah*, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali; dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaedi al-Baghdadi. Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (PRT Fatayat NU, 2015:4). Anggota adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan maksimal berusia 45 tahun (PRT Fatayat NU, 2015:9).

a. Lambang Organisasi Muslimat dan Fatayat NU

Lambang Fatayat Nahdlatul Ulama adalah setangkai bunga melati tegak di atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 (delapan) bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau, dan dibawahnya bertuliskan FATAYAT NU (PRT Fatayat NU, 2015:5). Arti dari lambang Fatayat NU adalah sebagai berikut:

1. Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci.
2. Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya, Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat NU.
3. Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan Perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul.
4. Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat mazhab.

5. Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar *dari Ahlussunnah wal Jamaah*.
 6. FATAYAT NU adalah organisasi pemuda atau perempuan muda Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah*.
 7. Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau berarti kesucian dan kebenaran.
- b. Visi Misi Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Tegal
- Visi dari Fatayat NU adalah terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan perempuan melalui penguatan hak-hak perempuan. Sedangkan misi dari Fatayat NU:
1. Membangun kesejahteraan perempuan.
 2. Membangun kemandirian perempuan.
 3. Mengupayakan perubahan kebijakan yang memihak perempuan.
 4. Membangun kapasitas sumber daya manusia.
 5. Membangun kapasitas organisasi.
- c. Struktur Kepengurusan Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Tegal
- Struktur kepengurusan pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------|----------------------------------|
| Pelindung | : PC NU Kabupaten Tegal |
| Penasehat | : PC Muslimat NU Kabupaten Tegal |
| Pembina | : 1.Ibu Dra. Hj. Umi Azizah |

2.Ibu Dra. Hj Nurkhasanah, MM
 3.Ibu Hj. Alfiyah ,S.Ag., M.Pd
 Dewan Kehormatan : 1.Ibu Nyai Hj. Azimatun
 Nikmah,BA

2.Ibu Hj. Kholidah
 Ketua : Ida Hidayati,S.Ag
 Wakil Ketua I : Hj. Umi faizah,SE
 Wakil ketua II : Hj. Noviatul Faroh,S.IP
 Wakil Ketua III : Hj Nur Azizah,S.Pd.I
 Sekretaris : Masrukha
 Wakil Sekretaris I : Asih yanti
 Wakil Sekretaris II : Nur Afifah
 Bendahara : Aminatul Islamiyah,SE
 Wakil Bendahara I : Hj. Nuhbatun Nisa,S.Pd.I
 Wakil Bendahara II : Umi Kulsum,S.Pd.I
 Seksi Bidang :

BIDANG-BIDANG

1. Bid. Pengembangan Organisasi Pendidikan dan Pengkaderan

Koordinator : Hj. Khumyati, Sag
 Wakil Koordinator : Khalimatun Alfiyah, SPd
 Anggota : Khusnul Khasanah, SPd
 Aenul Fahmiyah, SPd
 Elok Rihanah, SPd

2. Bidang Hukum, Politik dan Advokasi

Koordinator : Maisah
Wakil Koordinator : Aeni Fitriyah, S.Pd
Anggota : Umi Atiqoh
Farkhatun Agus Salim
Lutfiyah

3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Umi Hani, SST
Wakil Koordinator : Yuneni
Anggota : Faizah, SPd
Uripah, SPd.I
Tamaroh

4. Bidang Sosial, Seni dan Budaya

Koordinator : Hj. Mas'atun
Wakil Koordinator : St. Dewi Aisyah
Anggota : Lubnah
St. Khotmah
St. Saeruroh

5. Bidang Ekonomi

Koordinator : Feeni Arsiani
Wakil Koordinator : St. Subaedah, SPd
Anggota : Mualfiyah, SPd
Ulfah Rosidah, SPd.I
Dewi Aminah

6. Bidang Dakwah

Koordinator : Baetur Rizqoh, Sag
Wakil Koordinator : Hj. Sarijah, SPd.I
Anggota : Hamidah
Aenul Ghuroh
Ayun Badriah, SPd

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Ma'ani, SPd.I
Wakil Koordinator : St. Fatimah, Sag
Anggota : Titik Widiastuti. SPd
Nurlaela
Nur Khamala

d. Program Kerja Fatayat NU Kabupaten Tegal

Program Kerja Fatayat NU Kabupaten Tegal
Masa Khidmat 2016-2021

1. Pengembangan Organisasi Pendidikan dan Pengkaderan
 - a. Rakercab dalam rangka penyusunan strategis planing
 - b. Konsolidasi dengan Banom NU
 - c. Pelatihan Pengelolaan Organisasi
 - d. Pengadaan /Penyeragaman Buku Admins Fatayat NU
 - e. Rapat pengurus Cabang & PAC secara berkala
 - f. Pelatihan MC
 - g. Lomba Administrasi

- h. Sosialisasi PD PRT
 - i. Pembinaan Organisasi
 - j. Memaksimalkan jaringan net working(data base)
 - k. Menyelenggarakan Pengkaderan
 - l. Menyelenggarakan TOT
2. Hukum Politik dan Advokasi
- a. Menyelenggarakan pendidikan politik untuk perempuan
 - b. Sosialisasi sadar hukum
 - c. Sosialisasi pelanggaran Ham & anti kekerasan terhadap perempuan
 - d. Optimalisasi LKP3A dengan mengadvokasi korban sampai keranah hukum
 - e. Merekomendasi diterbitkannya regulasi yang berpihak pada perempuan dan anak
 - f. Mensukseskan kader fatayat utk menduduki posisi strategis dalam pengambil keputusan & penentu Kebijakan
3. Kesehatan dan Lingkungan Hidup
- a. Sosialisasi Germas & PHBS
 - b. Sosialisasi Kespro
 - c. Refitalisasi LKP3A
 - d. Sosialisasi dan membentuk bank sampah

- e. Berpartisipasi dalam penghijauan bekerjasama dengan DLHKP
 - f. Menyelenggarakan jalan sehat & senam Fatayat
 - g. Sosialisasi deteksi dini kanker serviks & Payudara
 - h. Sosialisasi gerakan sms bunda yang bermanfaat utk kurangi AKI & AKB
 - i. Gerakan anti narkoba & penyakit masyarakat lainnya
 - j. Menyampaikan informasi ttg makanan sehat
 - k. Mengawal Desa Siaga
 - l. Melakukan pengobatan gratis bagi masyarakat & donor darah
4. Sosial, Seni dan Budaya
- a. Membangun kesadaran & kepekaan masy thd masalah sosial
 - b. Penggalangan dana utk korban bencana
 - c. Pelatihan Mars Fatayat, Subanul wathon & Sholawat Nahdiah
 - d. Membentuk Group hadroh PC Fatayat
 - e. Menyelenggarakan lomba Mars fatayat & Hadroh dan di public ke youtube
 - f. Mensosialisasikan Islam Nusantara sebagai Islam Rohmatil lil Alamien

5. Ekonomi
 - a. Pelatihan wirausaha & Industri
 - b. Bekerjasama dg Instansi terkait
 - c. Pengadaan seragam resmi Fatayat lewat jasmine
 - d. Rekrutmen anggota Jasmine dari PAC & PR
 - e. Penggalan dana untuk operasional org melalui Goro PR
 - f. Pengenalan /pemasaran Produk lokal dari PAC melalui Bazar
 - g. Ngaji Investasi kerjasama dengan PP Fatayat NU
6. Dakwah dan Pengembangan Anggota
 - a. Pendataan Majelis Ta'lim Daiyah dan Hafidzoh
 - b. Lomba Pidato & MC
 - c. Mengaktifkan Fordaf dengan membentuk media silaturahmi yg efektif
 - d. Mengembangkan Dakwah melalui Radio & Medsos
 - e. Meningkatkan Capacity Building Daiyah
7. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Membuat Data Base On Line
 - b. Pembuatan Buku Induk Fatayat
 - c. Optimalisasi penggunaan media sosial
 - d. Melaksanakan pembuatan KTA Fatayat

- e. Melakukan pengkajian tentang persoalan-persoalan perempuan melalui seminar, pelatihan dan penelitian.

Tabel 9. Wilayah Kerja Fatayat NU Kabupaten Tegal

No	PAC	Alamat	Ketua	Jumlah PR/PAR
1.	Slawi	Trayeman – Slawi	Siti Khotimah,S.Pd	7
2.	Dukuhwaru	Blubuk – Dukuhwaru	Dewi Aminah	8
3.	Pagerbarang	Surokidul-Pagerbarang	Tamaroh	6
4.	Margasari	Gedung MWCNU Margasari	Siti Aroh	16/2
5.	Balapulang	Gedung MWCNU Balapulang	Feni Arsiani	20/6
6.	Jejeg	Gedung MWCNU Jejeg	Siti Zubaedah,S.Pd	20
7.	Bumijawa	Bumijawa	Khusnul Khasanah	9
8.	Bojong	Bojong	Nur Inayah,S.Pd.I	17
9.	Jatinegara	Gedung MWCNU Jatinegara	Umi Atiqoh	16
10.	Kedung Banteng	Karangmulya	Rismawati	9
11.	Lebaksiu	Lebaksiu	Nur Aflahatun,MPd	21
12.	Adiwerna	Tembok Luwung	Maisah	20
13.	Talang	Gedung MWCNU Talang	Hj. Fatimah,S.Ag	17
14.	Dukuhturi	Gedung MWCNU Dukuhturi	Ma'ani	11

15.	Pangkah	Gedung MWCNU Pangkah	Hj. Mas'atun	19
16.	Tarub	Gedung MWCNU Pangkah	Faizah	16
17.	Kramat	Gedung MWCNU Kramat	Hj. Sarijah,S.Pd.I	16
18.	Suradadi	MWC Suradadi	Titi Samiasih	16
19.	Warureja	Kreman - Warurejo	Lutfiyah	17

Sumber: PC Fatayat NU Kabupaten Tegal dikelola peneliti

BAB IV
PERAN JARINGAN PEREMPUAN NU
PADA PILKADA TEGAL 2018

A. Pandangan Fatayat dan Muslimat tentang Politik

Sebagai wujud kepedulian dari bangsa terhadap keutuhan negaranya, stabilitas politik pemerintahan, serta keberpihakan kebijakan pemerintah kepada rakyat, maka sangat wajar dan memang dipandang sebagai sebuah keniscayaan bahwa setiap warga masyarakat semestinya ikut tampil dalam ranah perpolitikan dengan apapun perannya. Tidak terkecuali dengan apa yang menjadi prioritas bagi organisasi kemasyarakatan Muslimat dan Fatayat NU.

Jika selama ini politik dimaknai sebagai dunia laki-laki, baik dalam pengertian dipenuhi oleh aktifitas kaum laki-laki, maupun dipengaruhi oleh karakter maskulinitas, akhir-akhir ini mengalami transformasi yang signifikan perihal hadirnya kaum perempuan dalam arena politik. Ini menandakan adanya kesadaran yang hadir dalam diri perempuan untuk ikut terlibat dalam dunia politik.

Dalam konteks Pilkada Tegal 2018 Fatayat dan Muslimat memandang politik adalah ruang yang boleh diisi oleh siapapun tanpa melihat jenis kelamin. Siapapun yang ingin terlibat dalam dunia politik baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan

apabila memiliki kapasitas yang mumpuni perihal perpolitikan tidak dilarang. Terkait soal kepemimpinan perempuan dalam politik, Fatayat dan Muslimat tidak mempermasalahkan selagi perempuan memiliki kapasitas yang baik dan layak menjadi pemimpin. Seperti kutipan wawancara berikut:

“jika secara umum politik itu berwajah laki-laki ya karena politik didominasi oleh laki-laki tapi bukan berarti perempuan tidak memiliki tempat di sana. Saya sangat mendukung bagaimana keterwakilan perempuan bisa eksis dalam ranah sosial, bahkan politik sepanjang tidak melanggar kodrat dia sebagai seorang perempuan sesuai dengan syariat islam.” (Wawancara Ketua PC Fatayat Kab.Tegal November 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus Ranting Fatayat Tembok sebagai berikut:

“Terkait dengan pemahaman politik ya, saya kasih pemahaman ke anggota bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam berpolitik dalam berpendapat, dalam berkarir dalam apapun, tetapi fitrohnya perempuan tetap harus diingat dan dipegang, tetap harus ada restu dari suami (Wawancara A’am, November 2018).”

Dalam konteks Pilkada Tegal 2018, perayaan demokrasi lima tahunan ini merupakan hajat bersama warga nahdliyin dalam mendukung kader nahdliyin maju dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Dalam hal ini politik dimaknai sebagai suatu upaya untuk memperjuangkan kepentingan

masyarakat Tegal. Berpolitik adalah bagian dari ikhtiar dalam melakukan penguatan terhadap agama dan khususnya penguatan terhadap hak-hak perempuan (Wawancara PC Muslimat NU kab. Tegal November 2018).

Maka ketika politik dimaknai sebagai usaha bersama masyarakat secara terpadu dan sistematis untuk membangun keadilan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Muslimat dan Fatayat NU melalui Umi Azizah, telah membuktikan bahwa tidak selamanya politik itu kotor, berpolitik tidak selamanya mengandalkan kepada modal uang yang besar. Berpolitik yang baik dan cerdas adalah berawal dari kesadaran masyarakat untuk senantiasa ikut andil atau berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keberhasilan berpolitik, khususnya dalam Pilkada Tegal 2018, bukan semata pada kekuatan modal materi yang dimiliki Umi, melainkan pada kekompakan dan kebersamaan para loyalis dan pendukung. Beruntungnya, masyarakat kabupaten Tegal mayoritas adalah muslim dan secara kultur keagamaan berafiliasi kepada organisasi Nahdhatul Ulama.

B. Pandangan Fatayat dan Muslimat tentang Organisasi

Perempuan diyakini menjadi elemen masyarakat yang sangat penting namun, hingga kini perempuan masih tertinggal dalam berbagai lini kehidupan dan mengalami berbagai persoalan, seperti kekerasan, minimnya akses pendidikan, stunting, ekonomi

dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut memang tidak terjadi saat ini saja, tetapi sudah menjadi masalah sejak lama, jauh sebelum Fatayat dan Muslimat NU berdiri. Memang, Muslimat dan Fatayat NU tidak dilahirkan dalam ruang kosong. Organisasi sayap NU ini lahir untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya perempuan. Dari sini Fatayat dan Muslimat NU memiliki dua dimensi. Pertama sebagai kaderisasi NU dan di sisi lain sebagai organisasi gerakan perempuan.

Berdasarkan dua dimensi itulah, Fatayat dan Muslimat NU dituntut untuk memainkan peran dua ranah strategis. Sebagai instrumen kaderisasi NU, Fatayat dan Muslimat NU diberi mandat untuk melakukan kerja kaderisasi dalam rangka menyiapkan kader-kader pemimpin perempuan NU dalam berbagai bidang. Sedangkan sebagai bagian penting dari gerakan perempuan di Indonesia, Fatayat dan Muslimat NU dituntut untuk ambil bagian dalam kerja advokasi perempuan, peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan reproduksi, pengembangan peran dan partisipasi politik perempuan, perlindungan perempuan dari tingkat kekerasan, dan lain sebagainya.

Dapat diketahui dari AD/ART Fatayat dan Muslimat NU memiliki tujuan mulia bagi kaum perempuan. Perempuan diberi kesempatan dan peluang untuk memaksimalkan potensinya diberbagai bidang sehingga para perempuan mampu

meningkatkan kualitas diri mereka sebagai individu bahkan sebagai warga Negara. Berbagai masalah dan ketinggalan perempuan NU terutama di desa-desa jelas masih banyak dan menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, kerjakeras Fatayat Muslimat NU dalam dua dekade terakhir setidaknya telah berhasil mengupgrade beberapa hal. Ajeng , Ketua PAC Pangkah Fatayat Kabupaten Tegal mengatakan :

“Duduknya ibu Umi sebagai perwakilan perempuan NU menjadi Bupati Tegal memberikan bukti bahwa Fatayat NU berkomitmen untuk terus mendukung kader-kadernya untuk andil di berbagai bidang, di bidang politik tanpa terkecuali” (Wawancara, Ajeng 23 November 2019).

Keterpilahan Umi sebagai Bupati Tegal memberikan contoh konkrit bahwa organisasi Muslimat dan Fatayat NU berkomitmen untuk ikut andil dalam menempatkan sosok perempuan di ranah politik. Umi sebagai pemimpin daerah menjadi jembatan penting dalam menyuarakan hak perempuan sekaligus memiliki kesempatan untuk menggali potensi serta meningkatkan kualitas diri. Jika selama ini melihat fakta perpolitikan di lapangan, terlebih apabila dikaitkan dengan isu-isu perempuan, maka Umi memandang perempuan harus tampil, ikut ambil bagian di dalamnya, agar hak-hak perempuan dapat diperhatikan, dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Tegal secara lebih proporsional. Sebab kenyataannya, masih terdapat kaum

perempuan di lokal-lokal tertentu yang termarginalkan, mereka tidak dapat mengakses dan memperoleh tata kelola kehidupan yang baik. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang kesadaran akan kejahteraannya, baik yang bersifat material maupun non-material, masih relatif rendah.

Kenyataan fenomena ini bukanlah tanpa dasar. Pengalaman masa bakti kepemimpinan di Muslimat NU, dengan segenap aktifitas dan programnya, membawanya dalam memandang akan perlunya partisipasi aktif dan nyata sebagai solusi berbagai permasalahan tersebut, khususnya terkait dengan persoalan perempuan dan hak-haknya. Hal ini, menurutnya, tidak mungkin akan berjalan dengan baik, kecuali terdapat komunikasi yang efektif antara masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Muslimat dan Fatayat NU sebagai badan otonom organisasi NU tentunya harus menjunjung tinggi kebesaran organisasi dan melaksanakan kebijakan organisasi. Dalam organisasi NU memiliki satu garis komando. Pada konteks Pilkada Tegal, Pengurus Cabang NU merupakan pemegang kebijakan dalam menentukan garis komando kepada siapa warga NU Kabupaten Tegal memilih wakilnya. Dalam hal ini, Pengurus Cabang NU Kabupaten Tegal melakukan kordinasi dengan semua badan otonom untuk menyeragamkan satu pilihan yaitu mendukung pasangan Umi-Ardie. Seperti yang di sampaikan Ibu

Ida Hidayati Ketua PC fatayat NU Kabupaten Tegal sebagai berikut:

“Di NU itu ada satu garis komando, ketika ada intruksi dari PC NU kemudian semua badan otonom mengikuti. Begitu juga kami di PC, ketika ada garis komando ada dukungan untuk ibu umi maka kita mendukung ibu umi, kan kita ikuti kordinasi akbar di PC NU, yang di undang adalah lembaga badan otonom di tingkat cabang. Kemudian kami mensosialisasikan kepada PC untuk 2018, pilkada calon yang di dukung adalah waktu itu masih entus-umi.” (Wawancara Ketua PC Fatayat, Tegal 13 November 2019).

Pada konteks di atas, Pengurus Cabang memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung Umi-Ardie. Melalui satu komando dukungan terhadap Umi-Ardie, baik Fatayat maupun Muslimat tentunya akan mendukung Umi-Ardie sebagai pilihan politiknya namun, satu komando tersebut tidak bersifat wajib. Ketua Fatayat Ranting Yamansari misalnya, dalam upaya menyampaikan komando tersebut kepada anggotanya, beliau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah amanat dari pengurus cabang yang harus disampaikan kepada anggotanya untuk mendukung ibu umi selaku ibu bagi fatayat, selebihnya beliau menyerahkan pilihan politiknya kepada anggotanya masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pengurus tingkat ranting. Menurutnya, tanpa ada komando dari pengurus cabang, 90% anggota fatayat ranting Yamansari yang berjumlah 100 orang

pasti memilih ibu Umi (Wawancara Ketua Fatayat Ranting Yamansari, Tegal 4 November 2019).

Senada dengan hal di atas, Ketua Muslimat Anak Ranting Balapulang Wetan juga menyampaikan bahwa komando yang telah diterima dari pengurus cabang merupakan suatu amanah yang harus disampaikan kepada jamaahnya, perihal nanti jamaah mengikuti komando tersebut atau tidak, sebagai ketua beliau sudah menjalankan amanatnya dan sebagai warga negara beliau juga tidak merampas hak politik sesama warganya namun, ada kepercayaan yang besar bahwa jamaahnya akan memilih ibu umi karena beliau adalah pemimpin muslimat di tingkat cabang. Seperti kutipan wawancara berikut :

“Saya sebagai ketua anak ranting berusaha mengajak jamaah lewat acara jam’iyahan setiap hari jumat sehabis dhuhur. Meminta dukungan karena ibu umi adalah ibu kita. Ga ada amplop-amplopan ga ada paksaan. Cuma tadi saya sampaikan kalau ibu umi ya ibune kita ya ayo bareng-bareng didukung”. (Wawancara Ketua Anak Ranting Muslimat NU, Tegal 6 November 2018).

Dalam konteks Pilkada Tegal 2018, gerakan satu komando bukan merupakan bentuk paksaan perintah dari pengurus di tingkat atas terhadap kepengurusan yang berda di tingkah bawahnya. Melainkan suatau bentuk I’tba’ anggota Fatayat dan Muslimat NU Kabupaten Tegal terhadap seruan Ulama Besar NU dengan kata lain kultur keagamaan yang

ditradisikan oleh masyarakat NU, yaitu ketaatan kepada para tokoh-tokoh keagamaan sudah menjadi pedoman bagi kader Fatayat dan Muslimat NU. Keyakinan dan kepercayaan terhadap para sesepuh ini menjadi salah satu kunci utama kemantapan kader Fatayat dan Muslimat dalam mendukung Umi Azizah untuk maju dalam pemilihan pimpinan daerah.

C. Pandangan Fatayat dan Muslimat Terhadap Kandidat Perempuan

Fatayat dan Muslimat dalam upaya memobilisasi suara pemilih dimudahkan karena melihat dari figur kandidat (Umi) dan kepatuhan masyarakat nahdliyin terhadap ulama. Fatayat dan Muslimat NU dalam melihat konstituen atau dalam hal ini masyarakat Kabupaten Tegal adalah *wonge dewek* karena masyarakat Kabupaten Tegal mayoritas adalah orang NU. Hal ini memudahkan kerja Fatayat dan Muslimat dalam menyukseskan Umi-Ardie untuk maju pada Pilkada Tegal 2018. Berikut akan dijelaskan figur Umi dan pandangan konstituen (Muslimat dan Fatayat NU) pada Pilkada Tegal 2018.

1. Profil Kandidat Perempuan

Umi Azizah lahir di lingkungan keluarga yang agamis. Ayahnya seorang Kyai dan memiliki pondok pesantren. Semasa menjadi mahasiswa, dia mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan. Sembari menjadi mahasiswa, dia juga

menimba ilmu agama di salah pondok pesantren. Berbekal ilmu agama dan ilmu sosial yang dimiliki, Umi dianggap kandidat yang memiliki paket komplit walaupun dia seorang kandidat perempuan. Majunya Umi sebagai Bupati Tegal didasarkan pada meninggalnya Enthus Calon Bupati Tegal Periode 2018-2023 karena serangan jantung. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan partai pengusung yaitu PKB, memutuskan Umi menjadi pengganti Enthus dan maju dalam Pilkada Tegal 2018.

Sebelum menjadi Bupati, rekam jejak Umi sebagai kader Fatayat Muslimat NU yang sangat bagus membuat sembilan Kyai Besar NU di Kabupaten Tegal memintangnya untuk menjadi Wakil Bupati menemani Enthus. Saat itu sembilan Kyai Besar NU di Kabupaten Tegal yaitu Kyai Wasari, Kyai Hambali, Kyai Irham, Kyai Jaelani, Kyai Munaseh, Kyai Abdul Rohim, Kyai Topik, Kyai Gufron, Kyai Nur Cholis dan Kyai Munip dari Kediri mendatangi rumah Umi untuk meminta menjadi Bupati Tegal. Umi merasa tidak pantas karena dia memikirkan dirinya sosok perempuan sedangkan di Kabupaten Tegal sosok laki-laki yang lebih mumpuni dari dia lebih banyak. Tetapi berkat penjelasan dari sembilan Kyai Besar tersebut dan berkat pemikirannya yang mendalam, akhirnya Umi mau menerima pinangan tersebut (Wawancara Juru Kampanye, Barokah 24 November 2019).

Jika melihat proses pemilihan Umi Azizah sebagai calon yang diusung oleh NU secara umum, maka secara normatif dapat dilihat bahwa di situ terdapat upaya demokratis dalam tubuh organisasi kemasyarakatan Islam tersebut. Para tokoh dan pengurus beserta anggota badan otonom NU Kabupaten Tegal dengan mempertimbangkan segala hal dari sosok Umi, baik dari pengalaman kepemimpinan, latar belakang pendidikan, keberpengaruhan di masyarakat dan sebagainya, maka Umi dipandang baik, mencukupi dan proporsional untuk dipasangkan dengan bakal calon Bupati. Namun hal yang mengejutkan adalah bahwa keputusan ini sama sekali tidak dikehendaki oleh Umi Azizah sendiri.

Alasan fenomenal dan utama yang menjadi penyebab Umi menolak permintaan tersebut adalah karena faktor politik uang yang selama ini sangat merajalela dalam dunia perpolitikan nasional. Umi melihat hal tersebut merupakan cara atau proses berpolitik yang sangat tidak terpuji dan harus dihindari. Ia juga mengira hampir tidak ditemukan seorang calon pimpinan daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah tanpa sebelumnya menyiapkan modal dana yang besar. Sedangkan faktanya, dia melihat diri sendiri yang jauh dari standar cukup apabila dicalonkan (Wawancara Juru Kampanye, Barokah 24 November 2019).

Saat menemani Enthus, kinerja Umi juga diakui bagus oleh sebagian besar pegawai pemerintah daerah. Saat kepemimpinan Enthus-Umi, Kabupaten Tegal pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di penghujung tahun 2018. Penghargaan tersebut tentu berkat kerja keras sosok Umi Azizah yang memiliki segudang pengalaman organisasi khususnya aktif di Fatayat dan Muslimat NU sejak muda.

“Masyarakat itu sudah pada suka pada ibu umi. Beliau itu kerjanya bagus sekali, saat belum jadi wakil bupati sampai jadi wakil bupati bahkan sekarang juga bagus, saat jadi ketua fatayat, muslimat beliau juga bagus, karena beliau berangkat dari organisasi muslimat fatayat.” (Wawancara, Eti 23 November 2019).

Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa dari awal Umi Azizah tidak mencalonkan diri menjadi Bupati Tegal. Bahkan menjadi wakil saja dia di minta oleh sembilan kiyai. Figur sederhana Umi tersebut juga di praktekan dalam dia memimpin Organisasi Muslimat NU. Beliau menjadi ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal. Menurut salah satu anggotanya, Umi sosok yang sangat sederhana dan merakyat.

“Ibu itu sosok yang sederhana. Pas waktu itu ada kegiatan terus kan ada acara makan-makan, pas kebetulan itu lesehan mba di atas tikar, Beliau ikut saja

makan dengan kita di atas tikar. Juga saat itu kan kami silaturahmi ke rumah Beliau sehabis lebaran ya, beliau itu masak sendiri, nyambal sendiri buat jamuan kami. Beliau itu benar-benar sosok yang sederhana dan bersahaja di mata kami” (wawancara, anggota Muslimat, 16 November 2019).

Ketika ada cara yang berkaitan dengan kegiatan Fatayat dan Muslimat, Umi selalu menyempatkan hadir. Saat jamuan acara dengan cara lesehan duduk di lantai beralas tikar, Umi tidak segan-segan ikut duduk makan bersama dengan para anggota yang lain tanpa ada jarak sama sekali. Figur Umi yang sederhana juga tercermin dari cara berpakaian. Menurut anggotanya, tidak ada yang berubah cara berpakaian dari Umi, saat menjadi aktivis Fatayat maupun Muslimat dengan sekarang menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tegal. Umi tetap sederhana dan bersahaja.

2. Pandangan Fatayat dan Muslimat NU Terhadap Kandidat Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa pandangan konsituen dalam hal ini adalah Fatayat dan Muslimat NU terhadap sosok kandidat Umi Azizah diantaranya akan dijelaskan di bawah ini.

a. Figur Aktivistis

Perjalanan hidup Umi sebagai aktivis berkiprah di masyarakat menarik untuk dipaparkan karena akan

berpengaruh pada mobilisasi perolehan suara pada Pilkada di Kabupaten Tegal. Sebelum berkecimpung di ranah politik, Umi lebih dulu mengawali kiprahnya dengan mendedikasikan diri aktif di organisasi kemasyarakatan perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) kabupaten Tegal. Tercatat selama dua periode, Umi Azizah terpilih menjadi ketua PC Fatayat NU, yaitu tahun 1987-1992 dan 1992-1997. Kepiawannya Umi memimpin organisasi ini juga tercermin lewat kepemimpinannya sebagai ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal dari tahun 2005 hingga sekarang.

Umi Azizah terpilih untuk memimpin Muslimat NU Kabupaten Tegal periode 2005-2010. Pada tahun 2007 Beliau juga terpilih menjadi Wakil Ketua Korda Muslimat NU Karesidenan Pekalongan. Selesai memimpin Muslimat NU Kabupaten Tegal untuk satu periode, Umi Azizah terpilih kembali untuk memimpin Muslimat NU Kabupaten Tegal periode 2010-2015 dalam kegiatan konferensi Cabang VIII di Gedung PCNU Kabupaten Tegal. Pada periode selanjutnya, Umi terpilih kembali setelah berhasil mengantongi 251 suara. Pada periode 2016-2021 Umi juga dipercaya kembali memimpin Muslimat NU Kabupaten Tegal.

“Waktu pemilihan ketua muslimat cabang, dengan peserta 600 lebih langsung serentak memilih ibu umi tidak mau memilih calon lainnya, padahal ada 3 calon saat itu, ibu umi termasuk, langsung ada teriakan lanjut lanjut seperti itu.”(Wawancara PAR Muslimat NU, Ro 6 November 2018).

Kutipan wawancara diatas menandakan bahwa figur Umi sebagai aktivis Fatayat dan Muslimat sudah tidak diragukan lagi. Alasan mendasar anggota Muslimat memilih kembali Umi sebagai pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Tegal tidak lain karena kinerja Beliau yang sangat bagus dan intensitas kedekatan Beliau dengan anggota. Adanya Pilkada merupakan salah satu diantara wadah menuju jawaban dari pembuktian peranan Fatayat Muslimat NU dalam ranah perpolitikan.

b. Figur Petahana

Figure Umi Azizah sebagai personal yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tegal, mengacu pada posisinya sebagai incumbent yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018 menggantikan Ki Enthus Susmono juga menarik untuk dipaparkan. Posisi Umi Azizah sebagai petahana (incumbent) jika diperbandingkan dengan pasangan lain yang maju dalam pilkada Kabupaten Tegal 2018 lebih

diuntungkan, karena masyarakat Kabupaten Tegal secara umum lebih mengenal dengan tokoh ini.

Keuntungan lain dari petahana adalah mempunyai jaringan luas dengan berbagai jajaran birokrasi yang ada di kabupaten Tegal. Hal ini diperkuat dengan pasangannya Ardie berasal dari cucu ulama ternama di Babakan, yaitu KH. Nasori. Ini bisa menjadi nilai tambahan bagi Umi-Ardie karena sudah barang tentu ulama memiliki jamaah yang berjumlah tidak sedikit. Dengan demikian pasangan Umi-Ardie lebih dikenal oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tegal.

Sebagai pemimpin organisasi wanita terbesar di Kabupaten Tegal ini, Umi tidak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tapi juga fokus pada pembenahan dan penguatan manajemen organisasi hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Wanita kelahiran 1960 ini selama menjabat sebagai wakil bupati juga dikenal aktif mengawal berbagai program sosial kemasyarakatan seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Sebagai wakil bupati tidak sedikit prestasi yang ditorehkan Umi salah satunya adalah mengawali lahirnya badan amil zakat di Kabupaten Tegal.

Deretan prestasi Pemkab Tegal juga tidak terlepas dari campur tangan Umi dan gaya kepemimpinannya yang mengayomi sampai dilantik menjadi Bupati Tegal 5 November 2018 lalu meneruskan Enthus. Saat Umi memimpin pertama kalinya pula Kabupaten Tegal meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di akhir tahun 2018. Faktor lain yang memperkuat ketokohan (figure) Umi karena Umi adalah incumbent, di mana masyarakat Kabupaten Tegal telah melihat program-program dan kebijakan tokoh ini yang riil, bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

c. Figur Populis

Populisme merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan oleh para sarjana. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di benua Amerika Latin pada 1940-1960an, populisme diidentikkan dengan rezim personalistik yang berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat dimana perkembangan organisasi dan institusi telah dilumpuhkan. Banyak sarjana dan analis beranggapan bahwa istilah populisme merujuk pada gaya rejim dimana pemimpin politiknya menggunakan gaya personalistik. Istilah populisme (populis dalam bahasa

latin) berarti sebuah gerakan, sebuah rejim, seorang pemimpin atau bahkan sebuah negara yang mengklaim memiliki kedekatan dengan rakyat (Imelda, 2015:18).

Dalam rangka menduduki kursi eksekutif lokal, para pemimpin populis menggunakan berbagai strategi. Berdasarkan strategi yang digunakan, populisme dapat dibedakan menjadi dua varian yaitu populisme irasional dan populisme rasional (Imelda, 2015:19). Dalam populisme irasional, pemimpin populis menggunakan kharisma dan ideologi untuk menghipnotis masyarakat atau pengikutnya. Pemimpin populis irasional tidak memiliki basis kekuatan politik yang kuat. Pengikutnya adalah kumpulan masyarakat kelas bawah yang pernah kecewa, terabaikan dan termarginalkan oleh pemimpin sebelumnya.

Sementara itu, pemimpin populis dalam varian populisme rasional akan mengandalkan prestasi, kemampuan leadership, skill yang dimilikinya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pemimpin populis rasional telah memiliki basis kekuatan politik yang kuat. Pendukungnya merupakan masyarakat yang kritis dan rasional karenanya pemimpin populis juga dituntut untuk bertindak rasional.

Pada konteks Pilkada Tegal 2018, Umi dikategorikan sebagai pemimpin populis karena memiliki gaya kepemimpinan yang kharismatik dan dekat dengan rakyat. Dalam hal ini, sewaktu memimpin Fatayat bahkan saat memimpin Muslimat, Umi memiliki jiwa yang kharismatik dan memiliki kedekatan yang intensif dengan anggota-anggotanya. Umi ini dipilih oleh mayoritas (71%) masyarakat Kabupaten Tegal sebagai bupati karena diyakini memiliki karakter kepemimpinan populis dan dekat dengan rakyat. Seperti yang di sampaikan narasumber berikut ini:

“Kedekatan ibu umi dengan anggota muslimat sudah tidak perlu diragukan lagi. Dibuktikan di acara sabtu pleno beliau pasti menyempatkan hadir. Acara tersebut dihadiri perwakilan anggota muslimat tiap anak ranting diambil 5 orang sekabupaten.” (Wawancara Atik, 17 November 2019).

Umi mengandalkan pengalaman organisasi baik di Fatayat maupun Muslimat, skill dan leadership serta prestasi yang dimilikinya, membangun koalisi baik dengan masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Umi sebagai salah satu kandidat pada Pilkada Tegal 2018 diuntungkan karena karakter pribadinya yang telah tertanam dalam benak pikiran

masyarakat. Dua puluh tahun mengabdikan diri di organisasi Fatayat dan Muslimat NU mencukupi baginya untuk lebih dekat dengan pendukungnya.

D. Relawan Perempuan NU

Tim sukses atau sering disebut relawan merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan seorang kandidat yang ikut dalam sebuah kompetisi politik termasuk pada pemilihan kepala daerah secara langsung. Kehadiran tim sukses ini diharapkan dapat membantu para kandidat dalam mengimplementasikan strategi atau sebagai tempat meminta pendapat mengenai strategi yang perlu dilakukan. Pada umumnya pola rekrutmen tim sukses bermacam-macam. Secara umum, tim sukses dibentuk oleh partai pengusungnya. Disamping itu para kandidat juga membentuk tim sukses independen yang terdiri dari keluarga atau orang-orang kepercayaannya.

Untuk tim sukses partai biasanya tim tersebut sudah direkrut dari partai yang terdiri dari para pengurus partai yang memang sudah ada strukturnya hingga ketingkat desa. Sedangkan untuk tim sukses independen pola rekrutmen yang dilakukan para kandidat cukup bervariasi. Namun secara umum ada orang yang direkrut secara khusus namun, ada juga orang yang menawarkan diri pada kandidat untuk menjadi tim sukses atau tim relawan pemenangan sang kandidat. Bahkan ada tim sukses yang tidak

sama sekali melalui metode perekrutan, yang biasanya mereka merupakan keluarga dekat dari kandidat.

Untuk orang yang direkrut secara khusus oleh kandidat biasanya ditetapkan standar yang harus dimiliki. Beberapa standar yang umum digunakan oleh para kandidat untuk merekrut orang-orang dimaksud diantaranya : bahwa orang tersebut dianggap punya loyalitas dan sudah dikenal baik oleh sang kandidat, sudah sering bekerjasama dengan kandidat sebelum masa pencalonan bahkan kalau memungkinkan orang yang direkrut tersebut merupakan orang yang dianggap punya pengaruh besar diwilayah dia direkrut. Orang-orang ini biasanya akan menjadi tim sukses yang lebih dikenal dengan “ring satu” (orang-orang yang paling dipercaya oleh kandidat) selain keluarga dekat kandidat.

Dari beberapa tim sukses yang dimiliki oleh para kandidat umumnya tim yang paling dipercaya adalah tim sukses independen. Hal itu terjadi karena tim sukses yang dibentuk oleh partai politik dirasa kerjanya kurang fokus untuk mendukung strategi pemenangan sang kandidat. Alasan lain juga karena tim sukses dari partai umumnya tinggal begitu mengenal konstituen.

Pada konteks Pilkada Tegal 2018, kandidat dengan nomor urut 03 yaitu Umi-Ardie memiliki tim sukses atau yang di sebut relawan umaro, ada juga yang menyebut dirinya relawan ikhlas karena memang bekerjanya atas kemauan sendiri dan tidak masuk dalam struktur tetap tim sukses umaro. Struktur tim sukses Umi-

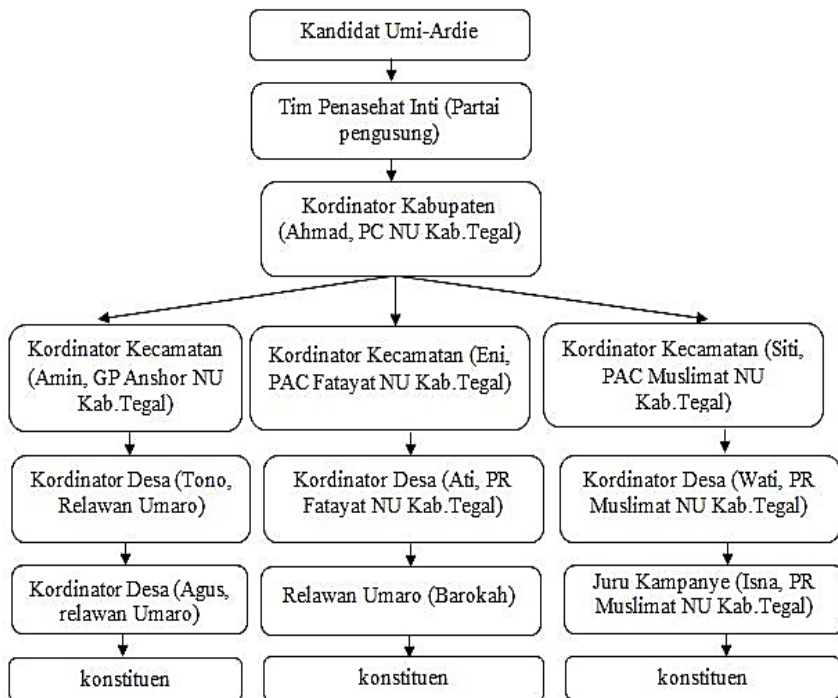
Ardie secara spesifik telah memiliki wilayah kerja tersendiri, di mulai dari kordinator kecamatan yang secara susunan di wailiki oleh GP Anshor, pengurus anak cabang dari Fatayat dan Muslimat, turun di level kordinator desa juga di tempati oleh pengurus ranting baik dari Fatayat maupun Muslimat yang secuara struktur telah memiliki kepengurusan dari tingkat cabang sampai tingkat anak ranting. Secara otomatis pengurus Muslimat maupun Fatayat di tingkat anak cabang menjadi kordinator untuk wilayahnya dan begitu seterusnya sampai pada tingkat anak ranting. Hal ini menjadi jalan mudah untuk menyentuh konstituen dalam rangka memobilisasi suara dalam proses pemenangan Umi-Ardie.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, para pengurus organisasi Fatayat dan Muslimat dari level ranting, anak ranting bahkan sampai level majelis taklim secara suka rela menjadi relawan umaro dengan melakukan sosialisasi bahkan kampanye secara langsung menemui konstituen. Upaya yang dilakukan relawan ini biasanya masuk ke acara majelis taklim di rumah warga dari desa satu ke desa yang lain. Seperti yang dilakukan Barokah dan kawan-kawan, juru kampanye Umi-Ardie yang berada di level Mulimat ranting secara sukarela mendatangi majelis taklim dari desa ke desa.

“saya bersama bu Is waktu itu turun langsung ke lapangan ke desa Banjarnayar, Danawarih banyak desa pokoknya

mb ya itu dalam rangka mengkampanyekan Umi-Ardie bertemu langsung dengan jamaah majelis taklim masuk dan mengajak jamaah untuk mencoblos nomor 03 yang ada gambar ibu Umi sama Mas Ardienya, ga ada perintah secara langsung dari ibu, tapi kan saya sebagai tangan panjangnya PC Muslimat merasa terpanggil oh mb” (Wawancara, Juru kampanye Umara, 24 November 2019).

BAGAN TIM SUKSES UMI- ARDIE



(Sumber: Wawancara Tim Sukses 16 November 2019 dikelola peneliti)

Dalam konteks kerja broker atau relawan perempuan pada Pilkada Tegal 2018, broker dalam hal ini kader Fatayat Muslimat yang berada di level bawah menjadi penghubung yang berperan penting untuk mengumpulkan informasi kebutuhan pemilih, karena Fatayat Muslimat memiliki akses langsung kepada pemilih baik melalui kegiatan rutin, pengajian-pengajian yang berada di majelis taklim maupun dalam bermasyarakat dengan lingkungan tempat tinggal disekitar. Fatayat Muslimat sebagai broker perempuan melakukan pola serap informasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Fatayat juga memetakan wilayah pemilih dengan tujuan agar tepat sasaran dan dapat menyerap aspirasi kebutuhan di daerah tersebut. Terakhir Fatayat Muslimat memetakan masyarakat berdasarkan klasifikasi keberpihakan dukungan.

“Saya memahami betul mb, bahwa dalam pengajian ini ada segelintir orang yang tidak berpihak ke ibu, ya tiga sampai lima oranglah ya karena faktor keluarga sih, mereka kan ada ikatan darahlah bahasanya dengan paslon itu, jadi ya saat pendataan dukungan saya ga mungkin oh mendata mereka karena saya paham pilihan politik mereka” (Wawancara Eti Korlap, 23 November 2019).

Pada umumnya, tim sukses juga berperan sebagai distributor yaitu seorang tim sukses perempuan yang bekerja membagikan barang-barang baik berupa kerudung, sembako dan lain sebagainya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan

politiknya, ini tidak terjadi kepada relawan perempuan Umi-Ardie. Dalam hal memobilisasi pemilih, relawan Umaro tidak memberikan barang berupa apapun bahkan tidak ada uang transport yang diberikan guna mendapatkan dukungan pemilih. Kekuatan yang mereka bawa dalam upaya mempengaruhi pilihan pemilih adalah tentang bagaimana figur kandidat dan capaian-capaian kerja kandidat selama menjadi wakil. Tanpa ada barang patronase dalam proses mobilisasi suara, masyarakat tetap memilih Umi-Ardie sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Dalam konteks loyalitas tim sukses terhadap kandidat, tim sukses perempuan memiliki kecenderungan lebih loyal dari pada laki-laki. dalam konteks Pilkada Tegal 2018, baik Fatayat dan Muslimat memiliki rasa kesetiaan yang tinggi terhadap kandidat yang didukungnya yaitu Umi-Ardie. Seperti yang disampaikan narasumber di bawah ini:

“perempuan itu lebih setia mba, ini juga banyak yang memilih karena suara perempuan. Fatayat itu solid, konsisten, pemilih perempuan itu pilihannya tidak akan berubah, kami setia pada pilihan kami.” (Wawancara, kader Fatayat, 12 November 2018).

Perempuan menjadi broker dalam tim merupakan strategi yang sangat baik. Karena perempuan bekerja lebih militan dibandingkan laki-laki. Selain perempuan juga lebih loyal terhadap dukungan politiknya, sehingga fenomena lompat

dukungan ditengah perjalanan itu jarang dilakukan oleh tim sukses perempuan.

BAB V

MOBILISASI SUARA JARINGAN PEREMPUAN NU PADA PILKADA TEGAL 2018

A. Mobilisasi Suara

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung (Pilkada), persaingan antar kontestan secara terbuka dan transparan merupakan keniscayaan. Kontestan yang mengikuti Pilkada Kabupaten Tegal 2018 secara umum melakukan strategi pemenangan, yaitu suatu cara atau metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin yang dicalonkan kepada masyarakat pemilih yang ada di Kabupaten Tegal. Strategi pemenangan yang digunakan satu kandidat dengan kandidat yang lain pada kontestasi Pilkada Tegal tentunya sangat beraneka ragam dan tampaknya tidak ada perbedaan yang terlampau jauh dalam gaya kampanye para kandidat.

Salah satu strategi pemenangan yang digunakan oleh kandidat nomor urut 03 Umi-Ardie adalah dengan menggerakkan jaringan organisasi-organisasi keagamaan yaitu Muslimat dan Fatayat NU yang memiliki struktur kepemimpinan yang hirarki dan memiliki nilai kepercayaan yang sangat tinggi. Struktur kepemimpinan lembaga Muslimat dan Fatayat NU dimulai dari posisi teratas yaitu Pimpinan Pusat yang berada di level Nasional,

Pimpinan Wilayah berada di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa, Pimpinan Cabang berada di tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang berada di tingkat Kecamatan, Pimpinan Ranting berada di tingkat desa dan Pimpinan Anak Ranting berbasis pada Masjid, Mushola dan Majelis Taklim.

Keterpilahan Umi Azizah sebagai Bupati Tegal tidak terlepas dari peran dua Organisasi Perempuan Muslimat dan Fatayat NU. Kekutan yang dibangun oleh dua organisasi tersebut dilandaskan pada kesamaan tujuan yaitu menempatkan Umi Azizah selaku kader perempuan NU untuk duduk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tegal. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Azimah salah satu PC Muslimat NU Kabupaten Tegal sebagai berikut :

“Ibu Umi merupakan kader Muslimat yang sangat luarbiasa. Semasa menjadi mahasiswa seperti anda, Beliau ambil jurusan Sospol, di tambah Beliau aktivis Fatayat Muslimat, ya tentu saya harus mendukung Beliau karena memang Beliau kader perempuan NU yang memiliki paket komplit luar biasa. Tegal membutuhkan sosok seperti Beliau.” (Wawancara PC Muslimat NU Tegal, 30 November 2019)

Hal senada juga di sampaikan Ibu Rokhmah Sekretaris PC Muslimat NU Kabupten Tegal sebagai berikut:

“Penting sekali ketika perempuan nahdliyin maju di ranah politik. Sosok Ibu Umi merupakan kader terbaik NU yang harus kita dukung. Selain rekam jejaknya di

Fatayat Muslimat yang bagus, figur Beliau yang luar biasa juga menjadi contoh bagi kami. Jadi tidak ada alasan bagi bagi untuk tidak mendukung Beliau.” (Wawancara PC Muslimat NU Tegal, 30 November 2019).

Pendapat lain yang disampaikan oleh Sekretris PC Fatayat NU Kabupaten Tegal juga membenarkan bahwa penting soal keterwakilan perempuan NU menduduki jabatan publik apalagi di ranah politik seperti menjadi Bupati. Kutipan wawancara beliau sebagai berikut :

“tentunya kami mendukung dalam upaya mendudukan ibu Umi menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tegal sebagai wujud perwakilan dari perempuan nahdliyin. Prinsip kami, ketika ada kader perempuan fatayat yang duduk itu adalah suatu bentuk kebanggaan tersendiri.” (Wawancara Sekretaris PC Fatayat NU Kab.Tegal Tegal, 20 November 2019).

Baik Fatayat maupun Muslimat NU Kabupaten Tegal, keduanya sepakat bahwa perempuan NU perlu hadir dalam segala bidang tidak terkecuali di ranah politik. Kekutan yang mereka bangun dalam mendukung Umi sebagai Calon Bupati Tegal pada masa itu tentunya berasal dari kesukarelaan hati anggota Fatayat dan Muslimat dalam berjuang mendukung kemenangan Umi. Fatayat dan Muslimat Sebagai organisasi yang memiliki basis

massa yang sangat banyak, mampu memberikan sumbangsih dalam memenangkan Umi pada Pilkada Tegal 2018.

Jika melihat lebih dalam lagi, kekuatan jaringan perempuan yang di sumbangkan oleh Fatayat NU Kabupaten Tegal yang pertama adalah soal jumlah anggota fatayat itu sendiri. Anggota fatayat NU Kabupaten Tegal berjumlah 36.000 anggota (Wawancara Sekretaris PC Fatayat Kab.Tegal, Tegal 20 November 2019). Melalui jumlah ini, gerakan yang dibangun dalam upaya memobilisasi suara untuk mendukung Umi-Ardie tentu tidak sulit. Kedua adalah bahwa Fatayat NU kabupaten Tegal memiliki 19 Pengurus Anak Cabang, 332 pimpinan ranting dan anak ranting (Wawancara Ketua PC Fatayat NU Kab.Tegal, Tegal 13 November 2019). Ini dapat menjadi jembatan penting dalam melancarkan strategi-strategi kampanye termasuk dalam upaya mengenal lebih dekat konstituen, mensosialisasikan profil Umi-Ardie sekaligus mengkampanyekan capaian kerja Umi semasa menjadi wakil bupati dalam upaya memobilisasi suara pemilih.

Tidak hanya di Fatayat saja, kekuatan jaringan perempuan juga berasal dari Muslimat NU. Jumlah anggota Muslimat NU Kabupaten Tegal mencapai 37.000 anggota. Muslimat NU Kabupaten Tegal juga memiliki 19 Pengurus anak Cabang, 370 Ranting dan 1244 Majelis Taklim (Wawancara PC Muslimat NU Kab. Tegal Tegal, 30 November 2019). Melalui struktur

kepengurusan ini, Muslimat mempercayakan sepenuhnya bahwa pilihan suara mereka adalah Umi Azizah. Senada dengan yang disampaikan PC Muslimat NU Kabupaten Tegal sebagai berikut:

“saya percaya 100% anggota kita mendukung ibu, sederhananya kita itu sami’na wa’atho’na terhadap Kyai ya buktinya suara ibu mencapai 71%. Di Muslimat itu paling pertama itu solid mba. Solid dan banyak berdoa sama Allah, tidak ada strategi-strategi khusus ya karena kita saling mempercayai dan solid tadi antar anggota” (Wawancara, PC Muslimat NU Kab.Tegal, 30 November 2019).

Berikut adalah strategi-strategi yang digunakan oleh jaringan perempuan NU pada Pilkada Tegal 2018:

1. Konsolidasi dan Sosialisasi

Strategi ini merupakan strategi yang paling awal dilakukan oleh Fatayat NU kabupaten Tegal. Fatayat NU sebagai anak dari Muslimat NU tentunya ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pasangan Umi-Ardie menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Langkah awal yang dilakukan Fatayat adalah melakukan sosialisasi terhadap anggota bahwa pada pilkada Tegal 2018 Fatayat mendukung pasangan Umi-Ardie. Kedua yaitu mengadakan konsolidasi pertemuan di tingkat cabang yang pesertanya adalah anak-anak cabang. Langkah selanjutnya yaitu Pengurus Cabang turun langsung ke lapangan melakukan konsolidasi pertemuan-pertemuan di

anak cabang di setiap kecamatan. Fatayat melakukan belusukan selama dua bulan masa kampanye Umi-Ardie secara intensif di setiap kecamatan atau daerah pemilih. Fatayat menjadwalkan satu pertemuan atau satu agenda itu 3 kecamatan pada setiap pertemuan dengan anak cabang dan selanjutnya dari anak cabang akan meneruskan kepada ranting bahkan sampai kepada anak ranting dan masyarakat pada level bawah melalui pengajian-pengajian yang dilakukan Fatayat di tingkat bawah.

Dalam implementasi strategi ini sebagian besar pengurus cabang melakukannya untuk mensosialisasikan pencalonan Umi-Ardie kepada sebagian pengurus anak cabang di wilayah yang dikunjunginya. Metode yang dilakukan biasanya menghubungi anggota anak cabang yang biasanya sudah mengetahui tentang pencalonan Umi-Ardie sebagai Bupati dan wakil Bupati Tegal. Anggota yang bersal dari anak cabang yang dihubungi tersebut diminta untuk memobilisasi anggota di bawahnya yaitu ranting untuk dikumpulkan disatu tempat dimana tempat tersebut akan didatangi oleh Pengurus Cabang Fatayat. Pengurus ranting yang dihubungi oleh pengurus cabang tersebut akan secara otomatis direkrut menjadi tim sukses walaupun tidak terdaftar dalam struktur. Oleh sebab itu tugas utama dari pengurus ranting adalah menjadi koordinator di setiap wilayah yang

dijadikannya target untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seperti yang di sampaikan Timses Umi di tingkat ranting sebagai berikut:

“saya sebagai pengurus ranting fatayat secara sadar terpanggil jiwanya untuk menjadi tim sukses Umi-Ardie ya waluapun tidak secara formal masuk dalam struktur. Otomatislah begitu. Tugas saya mengamankan daerah saya. Dan Alkhamdulillah daerah saya aman-aman saja. Dalam artian kami 90% suara ke ibu Umi. Paling ada dua desa yang sedikit suara ke bu Umi, ya karena ada faktor kekerabatan di sana. Selebihnya secara total daerah kami aman.” (Wawancara, Timses 2 Desember 2019).

Strategi sosialisasi ini sangat penting bagi seorang kandidat karena terkait dengan sistem pemilu yang digunakan saat ini yaitu suara terbanyak. Hal ini membutuhkan tenaga ekstra dari seorang kandidat untuk dapat secara maksimal mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat pemilih agar masyarakat dapat mengenal dirinya dan program-program yang akan dilakukan. Melalui jaringan Fatayat NU, proses sosialisasi profil kandidat dilakukan secara terstruktur dan merata. Pesan-pesan dukungan politik juga akan tersampaikan ke konstituen melalui jaringan yang dimiliki Fatayat NU sampai pada level akar rumput.

Kaitannya dengan Umi, bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Fatayat maupun Muslimat adalah kegiatan

yang bersifat alami. Baik Fatayat maupun Muslimat sendiri memiliki pengajian-pengajian rutin yang berjumlah ribuan, secara otomatis kegiatan aktifitas kampanye dilaksanakan melalui mereka dalam upaya memobilisasi suara. Secara singkatnya tidak ada program khusus dalam mengumpulkan massa. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu bersifat alami.

2. Gerakan Tanpa Politik Uang

Kontestasi Pilkada Tegal 2018 merupakan ajang pemilihan kepala daerah secara langsung yang di selenggarakan oleh KPUD Tegal dengan diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan salah satu parameter dari demokrasi daerah atau lokal, dengan kata lain adanya pilkada secara langsung merupakan jalan menuju penguatan demokrasi pada tataran masyarakat di tingkat lokal. Penguatan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung terkotori oleh praktik-praktik patronase dalam upaya mendapatkan suara pemilih. Praktik patronase yang dimaksud adalah pemberian uang tunai, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang di distribusikan oleh politisi termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan diberikan kepada kelompok/komunitas.

Salah satu tujuan pelaksanaan kepala daerah secara langsung menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2004 adalah sebagai upaya dalam menghindari adanya praktek *money politics* yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Ketika kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung diimplementasikan, realita di berbagai pelaksanaan Pilkada langsung di berbagai daerah Indonesia, kasus politik uang masih tetap ada yaitu lewat pembelian suara pemilih (vote buying). Adanya politik uang mengakibatkan pada tingginya biaya Pilkada yang harus ditanggung oleh calon/kandidat maupun partai pengusung. Politik uang juga berdampak pada kualitas, misalnya berbagai program yang tidak jalan, pembangunan yang tidak efisien dan munculnya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Pada konteks Pilkada Tegal 2018, fenomena politik uang tidak terjadi pada proses mobilisasi suara untuk pasangan Umi-Ardie. Cara kerja Fatayat Muslimat maupun tim relawan umaro dalam memobilisasi suara pada Pilkada Tegal memang berdasarkan kesukarelaan dan tanpa diimingi imbalan apapun oleh kandidat. Seperti yang dilakukan Ati seorang kordinator desa yang berasal dari PR Fatayat, dia bertugas dalam mengawasi gerak-gerik kader paslon lain jika ada yang membagikan uang dan memastikan jangan sampai ada yang lolos soal pelanggaran pilkada ini. Dia memahami

betul bahwa politik uang di Indonesia sudah luar biasa apalagi pada masa Pilkada. Sedangkan saat pilkada Tegal 2018 lalu, cara kerja tim sukses Umi-Ardie tidak menggunakan politik uang (Wawancara, Ati Kordes, 2 Oktober 2019).

Cara kerja dengan semboyan anti politik uang juga terjadi pada kader-kader militan Fatayat NU Kabupten Tegal. Pada saat pendataan pemilih yang berafiliasi kepada Umi-Ardie itu di lakukan dengan mendatangi tiap kecamatan yang ada di Kabupten Tegal tentunya dalam upaya memobilisasi pemilih. Biaya pengeluaran untuk transport, konsumsi, sewa gedung di tanggung dari kas Fatayat. Narasumber mengatakan tidak ada uang yang diberikan dari kandidat kepada Fatayat dalam rangka memobilisasi pemilih. Hal ini dapat diartikan bahwa yang ada Fatayat memberikan bantuan berupa uang, materi dan tenaga untuk kegiatan kampanye dalam rangka pemenagan Umi-Ardie.

“Saat pendataan untuk 3 kecamatan dijadikan satu, kami kan harus turun ke bawah, kami doktrin untuk memenangkan Ibu, itu kan butuh gedung yang harus dibayar, butuh snack yang harus di beli, butuh pengeras, kami bawa sendiri pakai uang kas, kalau uang yang kaya pilkades ya misal, satu orang saja Rp 200.000,- itu ga ada sama sekali.”(Wawancara, Sekretaris PC Fatayat NU 20 November 2019).

Wawancara yang di lakukan peneliti terhadap PC Muslimat NU Kabupaten Tegal juga senada, bahwa PC Muslimat mendukung Umi-Ardie pada Pilkada Tegal tanpa ada pemberian uang atau jenis apapun dari kandidat kepada PC Muslimat NU. Dukungan tersebut memang harus di berikan karena memang melihat kiprah dan kinerja kandidat yang membanggakan. Alasan lain juga berkenaan dengan perlu hadirnya perempuan nahdliyin sebagai perawat aqidah ahlusunnah waljamaah (Wawancara, PC Muslimat NU 30 November 2019).

Hal yang sama juga di lakukan oleh Eli Ketua Fatayat Ranting Yamansari. Sebagai ketua, upaya dalam memobilisasi suara dilakukan dalam forum-forum pengajian dan rekan sekerjanya. Dalam konteks pengajian, dia menyampaikan apa yang menjadi amanat pimpinan cabang untuk mendukung Umi-Ardie. Dia menyampaikan amanat tersebut sembari meminta dukungan untuk Umi-Ardie dan tanpa memberikan uang, kerudung atau barang lain.

“Upaya kami dalam memobilisasi suara ga pake money politics sama sekali, kita sampaikan apa yang menjadi amanat pimpinan untuk meminta dukungan bgtu, jadi kekuatannya memang jaringan perempuan muslimat dan fatayat, dalam upaya mobilisasi suara juga ada nilai trust kepercayaan dari anggota fatayat terhadap sosok bu Umi. Jadi tanpa uangpun jamaah pasti

memimilih Ibu, 90% lah begitu mba.” (Wawancara, Eli, 12 November 2019).

Pada proses wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber memang tidak ditemukan adanya upaya mobilisasi suara menggunakan uang. Peneliti hanya menemukan data dari satu narasumber tentang adanya anggaran masuk dari kandidat berkisar 10 juta yang diberikan kepada pengurus ranting sebagai wujud bantuan kegiatan operasional organisasi (Wawancara Kordes 2 Oktober 2019). Setelah peneliti melakukan konfirmasi lebih lanjut di beberapa ranting tidak ditemukan hal itu, artinya ini masih diragukan kevalidan atas informasi yang masuk soal pemberian dana berkisar 10 juta dari kandidat terhadap ranting karena narasumber diberagam ranting yang lain tidak pernah menemukan adanya hal semacam itu.

“Pada masa kampanye, semua bikin sendiri. Maksudnya ini memang inisiatif dari kami keluarga fatayat untuk membuat kaos umi-ardie, kami juga malah menyumbang. Semua biaya kampanye dari inisiatif swadaya, kaya semisal waktu kampanye akbar di dukuh salam, dari sewa transport, itu iuran dari anggota fatayat yang memang ingin ikut berkampanye, ada juga yang menyumbang makanan ringan, ada juga yang membawa air mineral. Itu murni inisiatif kami. Upaya memobilisasi suara untuk ibu umi benar-benar 0 rupiah.”(Wawancara, Ida 12 November 2018).

Perihal pemberian kaos sebagai upaya mobilisasi suara memang ada. Jatah kaos dari DPC PKB saat itu hanya 10 kaos untuk tiap ranting. Karena peminat kaos tersebut banyak, akhirnya dari salah satu ranting mencari sumbangan kepada donatur yang dianggap mampu berkontribusi untuk membuat kaos dan dibagikan ke masyarakat.

3. Silaturahmi

Strategi pendekatan yang Fatayat Muslimat gunakan untuk meraih suara konstituen yaitu strategi silaturahmi dengan dengan sasaran yang berasal dari anggota Fatayat dan Muslimat maupun yang di luar dari anggota tersebut. Silaturahmi bisa dikatakan sebagai bentuk kunjungan secara langsung kepada masyarakat di daerah tertentu. Konsep dasar silaturahmi yaitu pertemuan tatap muka antara dua atau lebih pihak untuk memelihara atau memperdalam relasi-relasi sosialnya dan merupakan praktek dari budaya lokal yang sekaligus memperoleh penguatan dari ajaran Islam (Agama yang dianut oleh mayoritas pemilih di daerah pemilihan ini).

Bagi kaum Muslim, silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan besar, baik berupa pahala di dunia maupun di akhirat. Latar belakang dari pahala yang didapat atas silaturahmi ini menjadi dasar legitimasi bahwa silaturahmi sebagai strategi kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Silaturahmi yang dilakukan berniat untuk

meminta doa restu dalam proses pencalonan kandidat maupun dalam upaya memperoleh dukungan suara.

Selain itu, kata silaturahmi juga berdekatan dengan kata silaturahmi yang artinya menjalin kembali hubungan-hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, sehingga membangkitkan rasa persaudaraan dan kedekatan emosional diantara pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, silaturahmi merupakan kata yang memiliki kekuatan kultural, baik dalam bentuk praktik keagamaan maupun sebagai praktik sosial yang dapat mempererat ikatan-ikatan sosial (Paskarina, 2015:278).

Dalam konteks Pilkada Tegal 2018, Fatayat Muslimat menggunakan beragam metode untuk mengkampanyekan Umi-Ardie sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Silaturahmi yang dilakukan adalah dalam rangka pengajian-pengajian yang dilaksanakn rutin oleh Fatayat maupun Muslimat. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu rumah warga. Jamaah yang hadir berkisar 50 sampai 100 jamaah. Dalam silaturahmi tersebut, baik fatayat maupun muslimat berupaya menyelipkan capaian-capaian kerja Umi selama menjadi wakil bupati dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari jamaah.

Selain itu, dalam upaya memobilisasi suara juga menyampaikan jasa-jasa para pendiri NU terdahulu. Bahwa

Nu telah berjasa dalam kehidupan orang-orang NU. Qunut dalam sholat adalah bagian dari orang NU. Dzibaan (Berzanji) adalah bagian dari NU. Ketika kita dengan mudah membacanya sehari sekali dalam sholat shubuh (Qunut), membaca sholawat saat Maulid, tetapi kita tidak mendukung Umi adalah suatu ketidakpantasan yang nyata. Kita menikmati hasil perjuangan orang-orang NU terdahulu tetapi kita tidak membalsanya dengan tidak mendukung Umi adalah suatu ketidakpantasan. Serentak jamaah yang di hadiri ratusan anggota histeris sepakat untuk mendukung Umi sebagai perwakilan orang NU.

Bentuk silaturahmi lain yaitu pada acara mudhakaroh yang dilakukan rutin oleh Fatayat maupun Muslimat NU. Mudhakaroh adalah semacam kegiatan pengajian yang diadakan di tingkat anak cabang setiap dua minggu sekali. Mudhakaroh adalah jamiyhan yang bersifat umum yang di selenggarakan oleh Fatayat maupun Muslimat. Jumlah jamaah yang hadir berkisar 2000 jamaah dan paling sedikit itu 600 jamaah. Dahulu, pembicara yang hadir adalah Kyai NU tetapi tidak terdaftar dalam struktur dan tentunya tidak memiliki kepentingan dalam membesarkan nama NU, beliau hanya mengamalkan amalan jariyah NU dan tidak ada kepentingan didalamnya. Atas dasar tersebut, pembicara dalam pengajian Mudhakaroh diisi oleh pengurus cabang baik Fatayat ataupun

Muslimat sehingga sosok seorang pengurus cabang itu terlihat. Dalam kegiatan tersebut disamping penguatan akidah ahlisunnah waljamaah juga diselipi untuk mengkampanyekan profil ibu Umi, capaian-capaian kerja Ibu Umi sekaligus Visi Misi Umi-Ardie (Wawancara, Sekretaris PC Fatayat Kab.Tegal, 25 November 2019).

Dalam konteks kegiatan mudhakaroh ini, silaturahmi berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini sebagai upaya membangun relasi dengan para konstituen, khususnya untuk memperkuat jaringan-jaringan yang sudah ada. Ini dilakukan oleh pengurus Cabang Fatayat maupun Muslimat yang secara struktur sudah jelas kepengurusannya di daerah-daerah dan pelaksanaannya yang bersifat rutin.

Bentuk silaturahmi lain yang diinisiasi oleh jaringan organisasi perempuan NU adalah dengan mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut bertujuan menysasar pemilih yang diluar dari NU. Kegiatan sosial yang diinisiasi oleh kordinator desa yang berasal dari anggota Fatayat itu snediri berupa santunan anak yatim dan bagi-bagi alat sholat kepada mualaf serta melakukan pembinaan kepada mualaf dan memberikannya santunan. Kegiatan ditutup dengan dengan doa bersama dalam rangka pemenangan Umi-Ardie (Wawancara, Kordes, 18 September 2019).

Dalam aktivitas-aktivitas sosial tersebut, distribusi barang patronase berlangsung melalui penyaluran dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas tersebut. Pada praktiknya, kandidat menyediakan uang tunai bagi tim kampanyenya yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Uang tersebut dibelanjakan untuk membeli konsumsi bagi peserta dalam kegiatan sosial tersebut. Kandidat tidak menganggap pembiayaan tersebut sebagai bagian dari *money politics* karena tidak ada uang tunai yang diberikan langsung kepada pemilih.

Strategi kampanye semacam ini dapat menjaring kehadiran masyarakat dalam jumlah besar untuk menghadiri acara-acara yang di selenggarakan oleh tisukses pendukung kandidat. Sosok Ardie calon Wakil Bupati Tegal saat itu adalah sosok yang baru dan belum banyak dikenal masyarakat. Silaturahmi sebagai cara yang lebih efektif untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemilih ketimbang memasang spanduk dan baliho yang mudah rusak atau hilang.

4. Mobilisasi melalui *Majelis Taklim*

Majelis taklim merupakan bentuk organisasi keagamaan yang sangat banyak di Indonesia. Di PC Muslimat NU Kabupaten Tegal tercatat 1244 majelis taklim dan di Fatayat tercatat memiliki 336 majelis taklim. Majelis taklim adalah lembaga pendidikan keagamaan informal yang bersifat

terbuka, fleksibel, dan sukarela, yang aktivitasnya dapat dilakukan di mana pun dan kapan saja: pagi hari, sore atau malam, di masjid atau musala, kantor, sekolah, rumah tinggal, dan tempat lainnya. Penggunaan terma majelis taklim itu sendiri hanya dikenal di Indonesia, yang diturunkan dari bahasa Arab: majelis yang berarti tempat untuk duduk, dan taklim yang berarti mengajar atau belajar (Ismanto dan Thaha, 2015:211). Tujuan utama dari majelis taklim ini pada dasarnya adalah untuk memperdalam pengetahuan agama Islam serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan pengikutnya. Jamaah majelis taklim biasanya membaca ayat suci Al-Qur'an secara bersama-sama, mendengarkan tausiyah dari ulama. Majelis taklim juga berguna sebagai forum guna mempererat silaturahmi antara jamaahnya.

Karena begitu kuatnya eksistensi majelis taklim dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal, serta mengingat begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya maka, majelis taklim menjadi simpul penting bagi Umi selaku kandidat guna mengkampanyekan dirinya ke konstituen. Banyak kandidat atau broker memanfaatkan majelis taklim ini sebagai wadah silaturahmi yang bertujuan untuk mengkampanyekan profil kandidat sekaligus melesatkan strategi kampanye mereka. Dalam konteks ini, baik Muslimat maupun Fatayat berupaya menyelipkan suatu ajakan untuk

memilih Umi sebagai Bupati Tegal di sela-sela pengajian yang sedang di jalankan. Seperti kata ibu Ro sebagai ketua Majelis Taklim sekaligus pengurus Muslimat Ranting, beliau mengatakan :

“ Ibu, jangan lupa nanti ikut kampanye akbar ibu umi di lapangan dukuh salam dengan menggunakan baju kebanggaan kita baju Muslimat dan jangan lupa untuk memilih ibu Umi sebagai bupati kita” (Wawancara Pengurus Muslimat Ranting Desa Balapulung, 30 Oktober 2018).

Kalimat ajakan tersebut terselip makna sebagai upaya pemanfaatan forum pengajian sebagai wadah untuk memobilisasi suara dukungan sebagai wujud mendukung kandidat Umi sebagai bupati. Upaya ajakan terhadap konstituen tidak hanya dilakukan di pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Muslimat saja, tetapi pada pengajian Fatayat juga terjadi upaya mengajak jamaah mendukung Umi. Seperti wawancara peneliti dengan Ketua Fatayat Ranting Desa Tembok, Beliau mengatakan :

“Dalam pengajian, saya hanya mengingatkan untuk mendukung ibu Umi, kenapa saya hanya mnegingatkkkan, ya karena tanpa diingatkanpun anggota sudah pasti memilih ibu, ya karena beliau memiliki kinerja yang bagus sih, dan tanpa saya himbau untuk memilih, saya yakin anggota saya

memilih ibu, seperti itu mb” (Wawancara Ketua Fatayat Ranting Tembok 30 November 2019).

Strategi lain yang dilakukan relawan Umi-Ardie yaitu blusukan ke *majelis taklim* yang ada di RT/RW di setiap desa. Diawali dari inisiatif pengurus Muslimat di setiap ranting karena merasa bahwa Pengurus Muslimat ranting merupakan penyambaung lidah dan tangan panjangnya pengurus cabang. Strategi blusukan ke jamiyah majelis tajlim ini dilakukan di desa-desa untuk menemui konstituen secara langsung. Sistemnya adalah pengurus ranting berkumpul dan membuat jadwal blusukan yang sarasanya adalah anggota jamiyah muslimat yang ada desa-desa. Jadi pengurus ranting Muslimat datang ke jamiyah-jamiyah yang ada di RT/RW di setiap desa secara langsung bertemu dengan jamaah dan tidak menutup kemungkinan sarasanya juga warga sekitar.

Sebelum melakukan strategi blusukan ini, pengurus ranting telah berkordinasi dengan pengurus anak ranting dalam memastikan tempat kampanye melalui rumah warga yang saat itu mendapat giliran menjadi tuan rumah jamiyah Muslimat rutinan. Setiap jamiyah jumlah anggotanya bervariasi dari 60 sampai 100 orang.

“Bekal dalam kampanye bertemu jamaah itu ya sesuai yang disampaikan Ibu Umi kepada kita itu perihal bolehnya perempuan terlibat didunia politik dengan

syarat dapat izin suami ya karena saya masih punya suami dan bolehnya perempuan memimpin. QS. Annisa ayat 34 itu kan laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dan memang perempuan ga boleh memimpin, yaitu ga boleh memimpin di rumah, kan pemimpinnya suami. Ayat ini bukan soal pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam kontek menjadi bupati, perempuan itu dilarang memimpin rumah tangga (menjadi kepala rumah tangga) dan dilarang memimpin sholat di masjid, perempuan boleh menjadi pemimpin kaya menjadi kepala desa, bahkan bupati, itu boleh. begitu mba yang saya sampaikan ke jama'ah (Juru kampanye Barokah November 2019).”

Pesan-pesan politik yang lain juga disampaikan oleh pengurus ranting dalam upaya mempengaruhi pilihan pemilih berupa penguatan ekonomi organisasi yang berwujud pada koperasi Annisa Muslimat NU. Koperasi ini menjadikan organisasi Muslimat NU sebagai organisasi yang mandiri melalui pembenahan dan penguatan manajemen, dan penguatan ekonomi yang dikelola oleh kader Muslimat NU. Isu lain yang dibawa adakah isu perihal kultur-kultur orang NU yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh saja budaya tahlilan, dzibaan bahkan bacaan qunut dalam sholat subuh. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadikan amunisi dalam memobilisasi suara. Jamaah diingatkan kembali bahwa

tahlilan, dzibaan bahkan qunut merupakan ajaran ahlisunnah waljamaah.

5. Mobilisasi *Door to Door*

Door to door adalah strategi lanjutan yang dilakukan dalam upaya pemantapan pemilih terhadap kandidat Umi-Ardie. Fatayat Muslimat dalam melancarkan strateginya dalam pemenangan Umi-ardie yaitu menjadi mobilisator. Dalam hal ini Fatayat Muslimat mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain dengan tujuan pendataan sekaligus pemantapan pilihan terhadap pasangan Umi-Ardie. Selama mendata kader Fatayat medatangi rumah ke rumah menanyakan pilihan politiknya. Kader Fatayat tidak meminta fotokopi KTP hanya menanyakan sudah memiliki E-KTP apa tidak. Fatayat Muslimat sebagai bagian dari tim pemenangan Umi-Ardie juga melakukan kerja mobilisasi yang menyentuh hal yang paling sensitif terhadap perempuan untuk mendapatkan pengaruh yang maksimal. Ketika kampanye dialogis dari rumah ke rumah dengan warga masyarakat khususnya perempuan, kader Fatayat Muslimat ini selalu memulai dengan kalimat

“Kita kan berkali-berkali hanya di sasar, hanya sebagai objek, di manfaatkan oleh orang lain, mari berkomitmen untuk sama-sama berjuang mendudukkan ibu Umi, ibune kita, perwakilan dari kita perempuan NU untuk duduk menjadi Bupati Tegal agar kita tidak

hanya dimanfaatkan, tetapi ada orange kita nanti di sana, insha Allah kalau sudah ada orange kita yang masuk ke sana, ke depan semuanya akan lebih mudah.” (Wawancara Imas, 16 November 2019).

Strategi *door to door* yang di lakukan kader Fatayat Muslimat berlangsung selama masa kampanye. Sasarannya tentu bukan hanya ibu-ibu rumah tangga tetapi laki-laki juga menjadi bagian penting dalam target sasaran mobilisasi suara. Selama paraktek di lapangan baik dri Fatayat maupun Muslimat tidak menemui kendala yang begitu berarti. Keja mobilisasi Fatayat Muslimat begitu mudah karena telah terbantu oleh kekuatan figur dari Umi itu sendiri. Karena berdasarkan wawancara peneliti, kebanyakan pemilih melihat figur dan kerja nyata Umi selaku kandidat petahan.

6. Mobilisasi *By Name*

Temuan yang harus dipertimbangkan dalam upaya yang dilakukan Fatayat NU dalam memobilisasi suara yaitu dengan menggunakan strategi *By Name*. Strategi *by name* adalah strategi mobilisasi suara dengan mekanisme pendataan nama pemilih atau calon pendukung yang akan memberikan dukungan kepada kandidat. Tujuan awal dari pendataan ini adalah sebagai upaya pemantapan yang dilakukan oleh Fatayat terhadap anggotanya namun, sasarannya bukannya hanya anggota Fatayat saja tetapi lebih bersifat umum. Fatayat

memiliki 500 sampai 300 anggota di setiap ranting. Saat itu, pengurus cabang mengharuskan setiap anggota fatayat mengamankan suara keluarganya untuk Umi, termasuk tetangganya dan siapapun yang berafiliasi mendukung Umi untuk di data dan di masukan ke dalam rekapan pemilih Umi.

“Waktu itu kami mengharuskan setiap anggota minimal mengamankan keluarganya, tetangganya di data, termasuk diluar dari fatayat, orang-orang disekitarnya, misalkan majikan ya kuline, saya punya RA, di sana guru-guru RA sana ya saya suruh untuk mendata dan mengamankan keluarganya, jadi sistemnya downline” (Wawancara Sekretaris PC Fatayat NU Kab.Tegal 25 November 2019).

Tabel 10. Rekapitulasi Pendukung Umi-Ardie Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah	
		KTP	Non KTP
1.	Adiwerna	8200	0
2.	Balapulang	26400	2259
3.	Bojong	13806	1122
4.	Bumijawa	39483	1520
5.	Dukuhturi	21200	974
6.	Dukuhwaru	14592	165
7.	Jatinegara	8960	1048
8.	Kedungbanteng	6790	282
9.	Karmat	5170	161
10.	Lebaksiu	11500	281
11.	Pagerbarang	13850	0
12.	Pangkah	8544	206
13.	Margasari	5266	137

14.	Slawi	3700	11
15.	Suradadi	10150	0
16.	Talang	9018	815
17.	Tarub	294	32
18.	Warureja	0	45
	Total	206923	9058
	Total KTP+Non KTP	215981	

Sumber: PC Fatayat NU Kab.Tegal di kelola Peneliti.

7. Pendampingan E-KTP

Strategi lain yang ditemukan di lapangan yang dilakukan Fatayat dalam upaya memobilisasi suara pemilih yaitu dengan melakukan pendampingan E-KTP terhadap konstituen yang tidak memiliki E-KTP. Fatayat memahami betul bahwa KTP merupakan syarat penting dalam menggunakan hak pilih seorang konstituen. Ternyata di lapangan analisa yang terjadi banyak pemilih yang tidak punya E-KTP seperti orang tua atau pemilih pemula tetapi yang belum sempat membuat E-KTP. Akhirnya dari pihak pengurus cabang mendata karena waktu itu ada banyak konstituen yang bermasalah dengan E-KTPnya.

Permasalahan perihal E-KTP di setiap desa itu ada. Masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak punya E-KTP, sementara itu menjadi persyaratan untuk memilih, akhirnya pengurus cabang Fatayat melakukan pendataan. Dari mulai pendataan kemudian pendampingan, dengan maksud sambil

menyisipkan sosialisasi perekrutan untuk pendudukan ibu Umi. Pembiayaan kegiatan ini ada bantuan dari pak Ardie selaku calon Wakil Bupati, jadi di samping pendataan, perekrutan kemudian pendampingan sampai diantar orang-orang yang mau mengurus E-KTP di dampingi oleh PAC. (Wawancara Ketua PC Fatayat NU Kab. Tegal 13 November 2019).

Sementara di sisi Muslimat NU, sifat dari pendampingan E-KTP dari konstituen yang bermasalah dengan E-KTPnya adalah lebih kepada personal. Salah satu anggota Muslimat mendapati pengaduan dari salah seorang warga perihal tidak memiliki E-KTP, dari pihak Muslimat membantu proses pembuatan E-KTP sampai selesai. Yang membadakan antara Fatayat dan Muslimat soal penanganan E-KTP adalah perihal sifatnya, jika di Fatayat di jadikan bagian dari program kerja karena banyaknya keluhan dari konstituen perihal E-KTP tetapi di Muslimat lebih bersifat personal satu dua orang yang bermasalah tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu digunakan sebagai staretegi memobilisasi pemilih suara dalam mendukung Umi-Ardie. (Wawancara PC Muslimat Nu Kab.Tegal 24 November 2019).

B. Implikasi Teori

No.	Landasan Teori	Penjelasan Teori	Implikasi Teori
1.	Jaringan Perantara	<p>1. Pengertian Jaringan Perantara</p> <p>Dalam banyak literatur broker didefinisikan sebagai pekerja kampanye yang termotivasi oleh imbalan materi. Selain itu, broker bekerja untuk mendistribusikan material dari kandidat kepada pemilih (Darwin, 2017:533).</p>	<p>Dalam hal ini, Muslimat dan Fatayat NU di definisikan sebagai broker politik atau biasa dikenal sebagai tim sukses yang bertugas sebagai perantara Umi-Ardie dengan masyarakat Kabupaten Tegal dengan tujuan memobilisasi suara mereka yang berada di akar rumput. Muslimat dan Fatayat NU sebagai tim sukses selain menghubungkan kandidat dengan konstituen, Muslimat dan Fatayat NU juga bertugas mengkampanyekan profil kandidat juga bekerja mendistribusikan barang kepada konstituen. Barang yang didistribusikan adalah sebuah kaos Umi-Ardie untuk persiapan kampanye akbar yang hanya berjumlah 10 biji untuk setiap ranting.</p>
		<p>2. Bentuk Jaringan Perantara</p> <p>a. Tim sukses</p> <p>b. Mesin-mesin Jaringan Perantara</p>	<p>a. Tim Sukses</p> <p>Dalam hal ini, setiap kader dari Muslimat dan Fatayat secara otomatis terpanggil hatinya menjadi tim sukses dalam membantu kemenangan Umi-Ardei baik yang masuk dalam struktur khusus tim sukses maupun tidak terdaftar dalam terstruktur yang bersifat</p>

			<p>sukarela. Dalam struktur Tim Sukses Umi-Ardie, baik Muslimat ataupun Fatayat masuk di dalamnya menjadi kordinator desa dan ada yang menjadi kordinator kecamatan. Di akar rumput ada yang menjadi juru kampanye yang langsung menandatangani masyarakat Tegal.</p> <p>b. Mesin-mesin Jaringan Perantara</p> <p>Musimat dan Fatayat NU memiliki <i>mejlis taklim</i> yang tersebar di Kabupaten Tegal. Ketua <i>majelis taklim</i> sebagai bagian dari kelompok pengajian menjadi bagian penting dalam memobilisasi anggotanya. Ini menjadi mesin-mesin jaringan sosial karena ketua merupakan tokoh yang memiliki pengaruh terhadap jamaah. Harapannya, para ketua majelis taklim ini bisa mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat Umi-Ardie.</p>
		<p>3. Cara Kerja Jaringan Perantara</p> <p>Cara kerja broker dalam mendulang suara salah satunya dengan cara mobilisasi “<i>by name by address</i>”. Broker akan</p>	<p>Cara Kerja Fatayat dan Muslimat NU dalam memobilisasi suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi dan Sosiolisasi 2. Gerakan Tanpa Politik Uang 3. Silaturahmi 4. Mobilisasi melalui <i>Majelis Taklim</i>

		melakukan pendataan calon pendukung kandidat dengan mendata warga yang akan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.	5. Mobilisasi <i>Door to Door</i> 6. Mobilisasi <i>By Name</i> 7. Pendampingan E-KTP
		4. Loyalitas Jaringan Perantara Triantini (2015: 373) menyebutkan bahwa broker, kader, atau tim sukses perempuan memiliki kecenderungan lebih loyal dari pada laki-laki.	Dalam konteks Pilkada Tegal 2018, baik Fatayat dan Muslimat memiliki rasa kesetiaan yang tinggi terhadap kandidat yang didukungnya yaitu Umi-Ardie. Sehingga 98% suara Fatayat dan Muslimat mendukung Umi-Ardie. Peneliti menemukan ada beberapa kader Fatayat NU khususnya yang tidak berafiliasi terhadap Umi-Ardie dikarenakan adanya faktor kekerabatan dengan paslon lain namun, jumlahnya tidak banyak hanya beberapa orang saja.
2.	Kesetaraan Gender	Nugroho (2011: 29) mengartikan kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati	Jika selama ini politik dimaknai sebagai wilayahnya laki-laki, ini tidak demikian seperti yang terjadi pada Pilkada Tegal 2018. Fatayat dan Muslimat NU mampu berpartisipasi di ranah politik sebagai relawan/tim sukses. Dalam kondisi umum, biasanya tim sukses banyak diisi oleh laki-laki, namun Fatayat dan Muslimat mampu membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi tim sukses dengan bergerak secara suka rela memobilisasi konstituen dalam

		hasil pembangunan.	mendukung Umi-Ardei. Fatayat dan Muslimat mampu menduduki posisi penting dalam struktur tim sukses baik dari level kabupaten sampai level akar rumput bertatap muka langsung dengan konstituen. Eksistensi Fatayat dan Muslimat sebagai relawan ini menandakan hadirnya kesadaran perempuan akan partisipasinya di ranah politik sekaligus menandakan adanya kesetaraan gender yang sudah mulai dipahami oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Terbukti dengan terpilihnya Umi Azizah, sosok perempuan sebagai pemimpin di Kabupaten Tegal, kungkungan patriarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki perlahan dapat tergeserkan dengan tampilnya kepemimpinan perempuan.
--	--	--------------------	---

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, pandangan elit Fatayat dan Muslimat NU tentang politik, organisasi dan kandidat perempuan. Politik dimaknai sebagai usaha bersama masyarakat secara terpadu dan sistematis untuk membangun keadilan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Muslimat dan Fatayat NU melalui Umi Azizah, telah membuktikan bahwa tidak selamanya politik itu kotor, berpolitik tidak selamanya mengandalkan kepada modal uang yang besar. Berpolitik yang baik dan cerdas adalah berawal dari kesadaran masyarakat untuk senantiasa ikut andil atau berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Terkait dengan keterlibatan organisasi Fatayat dan Muslimat NU pada Pilkada Tegal 2018 adalah melihat bahwa organisasi perempuan NU ini memiliki misi penting dalam upaya menransfer kader-kader perempuan NU diberbagai lini termasuk pada ranah politik, maka Fatayat dan Muslimat NU Kabupten Tegal mendukung pasangan Umi-Ardie pada Pilkada Tegal 2018 sebagai bentuk keseriusan Fatayat dan Muslimat untuk

menempatkan kadernya berperan dalam ranah politik. Selanjutnya, pandangan konsituen dalam hal ini adalah Fatayat dan Muslimat NU terhadap sosok kandidat perempuan (Umi Azizah) yang tergambarkan dalam figur aktivis, figur petahan dan figur populis.

Kedua, terkait dengan bagaimana Fatayat dan Muslimat bekerja dalam memobilisasi suara. Ada banyak cara yang dilakukan diantaranya dengan gerakan tanpa politik uang atau pemebelian suara terhadap konstituen melainkan melalui beberapa strategi diantaranya melakukan konsolidasi dan sosilaisasi dari tingkat cabang, anak cabang, ranting, anak ranting hingga pada tingkat akar rumput yaitu majelis taklim yang tersebar di Kabupaten Tegal, selanjutnya adalah silaturahmi, mobilisasi *by name*, mobilisasi *door to door*, pendampingan E-KTP serta mengoptimalisasikan peran anggota Fatayat dan Muslimat sebagai relawan Umi-Ardie dengan jumlah 73.000 anggota, juga kesolidan dan kepercayaan antar sesama anggota Fatayat dan Muslimat NU. Isu-isu yang dibawa kader-kader Fatayat dan Muslimat NU ini adalah soal kinerja kandidat yang bagus saat menjadi wakil, figur kandidat serta pemahaman tentang bolehnya perempuan terlibat dalam dunia politik yang terdapat dalam QS Annisa ayat 34.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba membuat saran-saran yang mungkin dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap penelitian yang telah dilakukan ini. Adapun saran-saran yang dapat dibuat penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pemahaman dari seluruh elemen masyarakat bahwa dalam memilih sosok pemimpin yang berkualitas harus diawali dari pemilihan yang berkualitas pula.
2. Perlunya pemahaman bersama bahwa dalam kontestasi pemilihan pemimpin, baik di level desa sampai level nasional ada cara yang lebih baik dari sekedar menabur amplop demi mendapat dukungan semata.
3. Perlu adanya program khusus dari pemerintah dalam menggandeng Fatayat dan Muslimat NU sebagai upaya mengembangkan kapasitas perempuan.
4. Perlunya sinergi dari masyarakat, pemerintah dan stakeholder yang lain dalam rangka memajukan Kabupaten Tegal ke arah yang lebih baik.
5. Bagi ASN dan penyelenggara pemilu, pertahankan netralitas dan budayakan transparansi sebagai bentuk keterbukaan terhadap publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Azwar, Syaifuddin. 2001. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farih Amin. 2009. *Wacana Perbedaan Ulama tentang Hukum Pemimpin Wanita*. Semarang: AKFI Media.
- Hamidi. Ahmad Zainul. 2015. “Madiun, Jawa Timur: Peran Broker dalam Strategi Teritorial, Jaringan Sosial, dan Pembelian Suara” dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Ismanto, Gandung dan Idris Thaha. 2015. “Banten: Jaringan dan Patronase Partai Islam” dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Paskarina, Caroline. 2015. “*Jawa Barat: Silaturahmi, Jaringan Personal, dan Politik Patronase*” dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Puspitasari, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT. IPB Perss.
- Robert, K Yin. 2006. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triantini, Zusiana Elly. 2015. “*Blora, Jawa Tengah: Sabet sebagai Penentu Kemenangan*” dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Artikel

- Artina, Dessy, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”, *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, Januari 2016.

- Cutts David and Allen Petter, "How Do Gender Quotas Affect Public Support for Women As a Political Leaders?", *West European Politics*, Vol. 41 No. 1, 2018.
- Darwin, Rizkika Lhena, "The Power of Female Brokers: Local Elections In North Aceh", *Countemporary Southeast Asia*, Vol. 39 No. 3, 2017.
- Eriyanti, Dwi Linda, "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20 No. 1, Juli 2016.
- Fadhil, Yusuf, "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Of Government and Civil Society*, Vol. 1 No. 1, April 2017.
- Fatmariza, "Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Quota 30%", *Demokrasi*, Vol. IV No. 1, 2005.
- Handoko, Waluyo, "Isu Perempuan Sebagai Strategi Komunikasi Politik Kampanye Calon dalam Pilkada", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2, 2009.
- Irawanto, Budi, "Political Machinery or Women's Network? The Case of Esat Java's 2018 Gubernatorial Election", *Yusof Ishak Institute*, No. 65, 2018.
- Ismiati, Tyas Asih, "Peranan Muslimat Sebagai Organisasi Wanita Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri: 1950-1999", *Simki-Pedagogia*, Vol. 01 No. 09, 2017.

- Isnaeniyah, Erni, "Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia Dalam Tradisi NU", *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No. 1, Maret 2017.
- Marlina, Siti, "Perempuan dan Pilkada dalam Perspektif Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam", *Al-risalah*, Vol. 15 No. 1, Juni 2015.
- Marwah, Sofa dan Handoko, Waluyo, "Perempuan dan Pilkada Langsung", *Yin Yang*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2008.
- Marwah, Sofa, "Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 2, Februari 2016.
- Nurul, Azizah, "Perempuan Pemenang Pilkada Studi Perspektif Gender dan Meluruhnya Budaya patriarki Provinsi Jawa Timur", *Marwah*, Vol. XIII No. 2, Desember 2014.
- Pratama, Rekha Aji, "Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2 No. 1, Maret 2107.
- Rahmatunnisa, Mudiwati, "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2016.
- Roviana, Sri, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III No. 2, Desember 2014.
- Rusmadi, "Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia", *Sawwa*, Vol. 12, No. 12, Oktober 2016.
- Saputra, Asep Deni, "Perempuan Subaltern dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial", *Literasi*, Vol. 1 No. 01, Juni 2011.

Sianipar, Imelda Masni Juniati, “Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan”, *Sociae Polites*, Vol. 16 No. 01, Januari-Juni 2015.

Umriana, dkk, “Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”, *Sawwa*, Vol. 12 No. 2, Oktober 2016.

Zamroni, Muhammad, “Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender”, *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV No. 1, 2013.

Skripsi

Abineri, Reza. 2018. Paslon Umi-Ardie Akhirnya Mendaftar ke KPU Tegal, <https://kumparan.com/panturapost/paslon-umi-azizah-sabilillah-ardie-akhirnya-mendaftar-ke-kpu-tegal>. Diakses pada 26 Oktober 2019.

Arofah, Nur. 2018. “*Peran Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal)*”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang 2018. (diunduh pada 12 Maret 2019 pukul : 13:02)

Internet

Gumilang, Arthur. 2018. Umi-Ardie Ditetapkan Sebagai Bupati-Wakil Bupati Tegal Terpilih, <https://jateng.tribunnews.com/2018/07/25/umi-ardie-ditetapkan-sebagai-bupati-wakil-bupati-tegal-terpilih>. Diakses pada 18 Oktober 2019.

Gumilang, Arthur. 2019. Hari Ini Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Yuk Mengetahui Lebih Dekat Sosok Umi-Ardie!. <http://jateng.tribunnews.com/2019/01/08/hari-ini-dilantik-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-tegal-yuk-mengenal-lebih-dekat-sosok-umi-ardie>. Diakses pada 5 April 2019.

Karimatunisa, Zidna. 2015. *“Perempuan Berpolitik Perspektif Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Keputusan Bahsul Masa’il Tahun 1961, 1997 dan 1996 M)”*. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015. (diunduh pada 12 Maret 2019 pukul 13:39)

Peta Kabupaten Tegal <http://peta-kota.blogspot.com/2016/12/peta-kabupaten-tegal.html?m=1> diakses pada 18 Desember 2019.

Priyanto, Mamdukh Adi. 2018. Ini Tiga Bakal Pasangan Calon di Pilkada Kabupaten Tegal 2018, <https://jateng.tribunnews.com/2018/01/10/ini-tiga-bakal-pasangan-calon-di-pilkada-kabupaten-tegal-2018>. Diakses pada 26 Oktober 2019.

Priyanto, mamdukh Adi. 2018. Nama Sabilillah Ardie sebagai Pengganti Enthus pada Pilkada Kabupaten Tegal Muncul di Luar Prediksi, <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/18/nama-sabilillah-ardie-sebagai-pengganti-enthus-pada-pilkada-kabupaten-tegal-muncul-di-luar-prediksi>. Diakses pada 26 Oktober 2019.

Qorina, Dzurotul. 2016. *“Peranan Muslimat Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan Di Batang Tahun 1998-2010”*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, Semarang 2016. (diunduh pada 12 Maret 2019 pukul : 14.45)

Toriq, Aqwamit. 2018. Muslimat NU Mendominasi Pilkada Jatim 2018, Pengamat: Solidnya Mengalahkan Kekuatan Partai,

<https://jatim.tribunnews.com/2018/07/11/muslimat-numendominasi-pilkada-jatim-2018-pengamat-solidnya-mengalahkan-kekuatan-partai> diakses pada 27 07 2019.

Yandip. 2019. Mengenal Sosok Bupati dan Wakil Bupati Tegal
Periode 2019-2024,
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mengenal-sosok-bupati-dan-wakil-bupati-tegal-periode-2019-2024/>. Diakses pada 25
Oktober 2019

LAMPIRAN

A. Foto



Foto Bersama Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Tegal, 13 November 2019 di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal.



Foto Bersama Ketua AR Fatayat Desa Balapulung Wetan dan Tim Sukses Umi-Ardie. 2 Desember 2019.



Foto bersama Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Tegal, 30 November 2019 di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal.



Foto bersama Juru Kampanye Umi-Ardie, 24 November 2019.



Foto Bersama Ketua Fatayat Ranting Yamansari, 4 November 2019,
di Rumah narasumber.



Foto bersama Ketua Ranting Fatayat NU Desa Pangkah dan
Kordinator Lapangan Umi-Ardie, 23 November 2019 di rumah
Narasumber.



Foto Bersama Ketua Fatayat Ranting Tembok dan Ketua Muslimat Ranting Tembok, 17 November 2019 di rumah Narasumber.

B. Draf Pertanyaan Penelitian

1. Dengan ibu siapa? Di muslimat/fayatat sebagai apa?
2. Jumlah anggota muslimat/fatayat ranting/anak ranting?
3. Program kerja muslimat/fatayat?
4. Jumlah majlis taklim muslimat/fatayat di kabupaten tegal?
5. Apakah ibu mendukung Umi pada pilbup tahun lalu?
6. Ibu sebagai pengurus, apakah ada upaya untuk mengajak anggota muslimat/fatayat untuk mendukung ibu umi juga?
7. Bagaimana pandangan ibu tentang organisasi yang mendukung ibu umi?
8. Bagaimana ibu memandang jamaah/anggota dalam konteks pilkada?

9. Melihat ibu Umi sbg perempuan nahdliyin (ketua fatayat/muslimat) Menurut Anda apakah penting untuk memiliki keterwakilan perempuan nahdliyin pada pilkada? Jika iya, mengapa?
10. Apa alasan ibu memilih ibu umi? Figur? Kinerja sbg bupati?
11. Apakah ibu dijadikan timses umi?
12. Apa penyebutan timses Umi-Ardie ?
13. Bagaimana pola rekrutment timses ?
14. Apakah ada pernyataan resmi dari pimpinan oraganisasi perempuan NU (Muslimat dan Fatayat) untuk mendukung Umi-Ardie? Semacam dikumpulkan dikumpulkan untuk mendapatkan instruksi dari lembaga untuk satu mengompakan suara memilih ibu Umi? Dimana? Siapa saja yang hadir saat itu? Pesan-pesan politik seperti apa yang disampaikan?
15. Bagaimana keterlibatan Organisasi Perempuan Muslimat dan Fatayat NU dalam proses mobilisasi suara ? Bagaimana strategi yang di gunakan?
16. Dalam memobilisasi suara, apakah menggunakan money politic atau pembagian sembako dsb? Kalau iya spt apa kalau tidak apa alasannya?
17. Bagaimana model struktur timses Umi-Ardie?
18. Berapa target suara yang ingin didapat?
19. Bagaimana tingkat kedekatan timses dengan kandidat?

20. Kapan mobilisasi suara dimulai dan berapa lama ?
21. Apakah proses mobilisasi suara dilakukan dari rumah ke rumah ?
22. Adakah upaya Muslimat dan Fatayat NU mendekati pimpinan jaringan sosial seperti PKK, Majelis Ta'lim dsb?
23. Jaringan sosial apa saja yang dimobilisasi Muslimat Fatayat NU ?
24. Apakah pola mobilisasi antara rumah ke rumah dengan mendekati jaringan sosial berbeda ?
25. Bagaimana model mobilisasi dari rumah ke rumah ? Meminta Fotokopi KTP kah atau seperti apa?
26. Bagaimana model mobilisasi terhadap jaringan sosial ? Harga jual apa yang ditawarkan dalam proses mobilisasi tersebut ? misal, memobilisasi komunitas pecinta olahraga, adakah janji dari kandidat untuk memperbaiki tempat olah raga mereka ? atau bagaimana ?
27. Jenis bantuan apa yang diberikan kandidat terhadap pemilih baik perorangan maupun kelompok-kelompok jaringan sosial?
28. Apakah dalam memobilisasi suara, muslimat dan fatayat NU menjual Issue Gender ? atau issue tentang kepemimpinan perempuan ?
29. Isu-isu apa saja yang dibawa selama proses mobilisasi suara ?
30. Bagaimana dampak atas keterpilihan Umi menjadi Bupati terhadap Fatayat/Muslimat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Anicka Muzaeni
2. TTL : Tegal, 02 Desember 1996
3. Alamat : Jl. Modes Rt 02 Rw 05 Desa Balapulang
Wetan, Kab.Tegal
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN BALAPULANG WETAN 06
 - b. SMP: SMP NEGERI 1 BALAPULANG
 - c. SMK : SMK NEGERI 1 SLAWII
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. Komisi B MPKM FISIP 2015-2016
 - b. HMJ Ilmu Politik 2016-2017
9. No. Hp : 089689942219
10. E-mail : Anickamuza96@gmail.com
11. Instagram : Nick0212
12. Motto Hidup : sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Semarang, 20 Desember 2019
TTD

Anicka Muzaeni